



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IV DPR RI DENGAN SEKJEN, IRJEN, DIRJEN PRASARANA  
DAN SARANA PERTANIAN, DIRJEN TANAMAN PANGAN,  
DIRJEN HORTIKULTURA, DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN, DAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
DAN KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : I (satu)  
Rapat Ke : 8  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2020  
Waktu : 10.45 - 18.20 WIB  
Tempat : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)  
Acara : 1. Membahas RKA K/L Tahun 2021, dan  
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
43 dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)  
9 dari 12 orang Anggota
    1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
    2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
    3. Ir. Mindo Sianipar
    4. Ir. Effendi Sianipar
    5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
    6. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
    7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.

8. Maria Lestari, S.Pd.
  9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)  
3 dari 8 orang Anggota
    1. Budhy Setiawan
    2. Firman Soebagryo, S.H., M.H.
    3. Alien Mus, S.H.
  3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)  
6 dari 8 orang Anggota
    1. G. Budiastrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
    2. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
    3. Renny Astuti, S.H., S.P.N.
    4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
    5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
    6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
  4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)  
4 dari 6 orang Anggota
    1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
    2. Sulaeman L Hamzah
    3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
    4. H. Charles Meikyansah
  5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)  
3 dari 6 orang Anggota
    1. Daniel Johan, S.E./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
    2. H. Muhtarom, S.Sos.
    3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
  6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)  
4 dari 5 orang Anggota
    1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
    2. Drs. Guntur Sasono, M.Si.
    3. Muslim, S.Hl., M.M.
    4. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.
  7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)  
5 dari 5 orang Anggota
    1. drh. H. Slamet
    2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
    3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
    4. H. Johan Rosihan, S.T.
    5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)  
3 dari 4 orang Anggota
  1. Haerudin, S.Ag., M.H.
  2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
  3. Slamet Ariyadi, S.Psi.
  
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)  
2 dari 2 orang Anggota
  1. K.H. Asep A. Maoshul S.Sy.
  2. Ema Umriyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
6. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian); dan
7. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

**Jalannya rapat:**

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, beserta jajaran,  
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat Wal'afiat. Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Pengganti Bamus pada tanggal 13 Juli 2020, dan keputusan Rapat Internal Komisi IV pada tanggal 24 Agustus 2020, serta tindak lanjut dari Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian pada tanggal 26 Agustus, pada hari ini kami tanggal 10 September 2020 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekkretaris Jenderal serta Eselon I lainnya dalam rangka membahas RKAKL Tahun 2021 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib, Rapat Dengar Pendapat hari ini kami nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)**

Rapat Dengar Pendapat hari ini kita mulai pada pukul 10.40, dan akan diakhiri pada pukul 16.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama. Adapun susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketura Rapat,
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian terhadap agenda rapat,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Eselon I,
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua,

Ini Ketua agak sendiri. Jadi perlu ditemani dan rasanya kalau ditemani oleh seorang perempuan lebih menarik Ketua.

Saya usul Ibu Renny saja saya usul, atas arahan Pak Mindo.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

Karena Pimpinan lain lagi sibuk di rumah masing-masing.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Rapat ini merupakan rangkaian dari rapat pembahasan RKAKL Tahun 2021 yang fokus terhadap pendalaman materi yang telah disampaikan pada Rapat Kerja tanggal 26 Agustus 2020 yang lalu.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi IV mengingatkan kembali agar masing-masing Eselon I bekerja sesuai dengan Tupoksinya dan memiliki skala prioritas. Para Eselon I harus mampu merancang kegiatan yang focus pada peningkatan produksi terhadap upaya pemenuhan pangan. Hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri produk pertanian serta mendukung ekspor dalam rangka meningkatkan devisa negara, Komisi IV mendukung ekspor tapi bukan ekspor yang dirayakan.

Dalam menyusun program, seluruh Eselon I harus merancang kegiatan yang berdampak signifikan terhadap sasaran nasional. Artinya volume kegiatan yang ditetapkan harus berorientasi nasional. Jangan berorientasi pada proyek-proyek yang Direktorat, sebaiknya kegiatan-kegiatan bervolume kecil dihilangkan, dan direalokasikan pada kegiatan berskala nasional atau pun regional.

Perencanaan sebaiknya dimulai dari program yang benar-benar dibutuhkan oleh petani. Bukan pembagian anggaran per Eselon I. Program prioritas yang ditetapkan harus menjadi dasar penentu pagu anggaran.

Jadi bukan anggaran mengikuti program tapi program yang mengikuti anggaran. Sehingga sangat dimungkinkan menjadi pergeseran. Anggaran per Eselon I sesuai dengan program yang diputuskan dan disepakati pada rapat hari ini. Jadi Eselon I beserta Sekjen harus mendengarkan masukan Komisi IV, bukan mau-maunya sendiri. Komisi IV secara prinsip tidak mensupport

anggaran terhadap kegiatan yang diluar Tupoksi, sebagai contoh acara-acara ceremonial ekspor yang dilakukan Badan Karantina dan Anggaran Biaya Operasional Perjalanan Dinas maupun rapat-rapat di hotel yang anggarannya dinilai terlalu besar.

Komisi IV juga menilai hal-hal tersebut kontra produktif dengan semangat efisiensi ditengah krisis. Selain itu anggaran Sekretaris Jenderal yang dinilai masih terlalu besar, padahal fungsi dan Sekretaris Jenderal merupakan supporting administrasi dan manajemen. Artinya anggaran Sekretaris Jenderal hanya mencakup satuan kerja di Kantor Pusat. Sehingga kami menilai masih perlu ditinjau ulang. Komisi IV mengingatkan kepada seluruh Eselon I agar pengadaan kendaraan Dinas tidak dilakukan pada Tahun 2021.

Kita masih prihatin dengan kondisi masyarakat kita. Terutama petani yang berdampak akibat krisis ekonomi. Kami minta Saudara Sekjen agar memperhatikan hal ini terkait kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan vokasi petani, SDM harus dilakukan secara massif. Kita ketahui bahwa tenaga kerja di sektor pertanian kurang lebih sejumlah 40 juta orang. Namun kami lihat volume pelatihan sangat kecil dan diperkirakan tidak berdampak secara nasional sehingga perlu dirancang program yang efisien dan mampu mencakup ratusan ribu atau bahkan jutaan petani.

Oleh karena itu perlu ada reformulasi program, diklat, vokasi pertanian, memperkuat sistem penyuluhan dan melibatkan penyuluh sebagai guru ... (suara tidak jelas). Kami juga masih melihat dalam kegiatan yang memiliki nomenklatur berbeda. Namun esensi kegiatannya sama alias tumpang tindih atau dengan kata lain agak disembunyikan.

Oleh karena itu kegiatan-kegiatan untuk sejenis agar disatukan sehingga berdampak nasional. Komisi IV menghimbau agar kegiatan disebar diseluruh Indonesia dan fokus pada wilayah sesuai dengan potensinya. Selain itu kegiatan yang selalu memberikan masalah dilapangan setiap tahun dan menjadi temuan BPK agar jangan diusulkan kembali, dan ditinjau ulang untuk direalokasi pada kegiatan baru atau kegiatan yang lain.

Semua bahan rapat sudah saya serahkan. Saya sudah bilang sama Saudara Irjen, sudah saya serahkan. Jadi sebelum kita bahas, saya sudah serahkan dulu. Mereka akan berikan masukan kepada saya, apa yang perlu dilanjutkan, apa yang tidak.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekjen atau Eselon I Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan hal-hal tersebut diatas.

Kami persilakan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI dan hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang hadir diruangan ini maupun yang virtual.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan RDP *Insha Allah* semuanya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali RDP pada hari ini, perkenankan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan RDP hari ini tanggal 11 dan 12 September 2020 sebagai tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 26-27 Agustus dengan outline antara lain, terkait dengan realisasi dan anggaran untuk 2020, rencana kerja 2021 termasuk DAK.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Sebagai bahasan pertama ijin kami mewakili jajaran Eselon I untuk menyampaikan laporan anggaran lingkup Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2020 ini setelah adanya refofusing kegiatan dan pemotongan anggaran Kementan menjadi 14,06 Triliun, sedangkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ini telah mencapai 8 Triliun atau 56,93%. Selain itu sebagian Eselon I lingkup Kementan sedang melakukan upaya percepatan program atau kegiatan dilapangan, dimana sampai tanggal 31 Agustus 2020 sudah melakukan kontrak atau outstanding kontrak sebesar 1,25 Triliun atau 9,21% yang *Inshaa Allah* akan selesai dibayar dalam kurun waktu yang tidak lama. Sehingga dalam waktu dekat diharapkan serapan anggaran Kementan ini diperkirakan sekitar 66,14%. Rincian serapan anggaran dari masing-masing Eselon I tersaji pada bahan RDP.

Selanjutnya kami laporkan pula Pak Ketua bahwa Kementan pada Tahun 2020 mendapat anggaran belanja tambahan, dimana DIPA-nya sudah disetujui tanggal, ada yang 22 Agustus, 25 Agustus, dan 2 September sehingga baru sempat dilaporkan. Dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk dukungan swasembada gula. Ini sebesar 137,39 Miliar diperuntukan bagi kegiatan rawat Ratun seluas 5000 hektar dan penyiapan benih seluas 1864 hektar,
- Dukunganantisipasi kekurangan pangan akibat COVID-19 ini sebesar 1,45 Triliun digunakan untuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah, ini sebesar 221 Miliar dan perluasan areal tanam baru padi seluas 250 hektar. Ini nilainya sekitar 1,05 Triliun.
- Pengembangan untuk bantuan sapi pada 5 klaster di 25 Desa. Ini sebanyak 5000 ekor sebesar 140,43 Miliar dan pengembangan *Food*

*Estate* di hortikultura di Humbang Hasundutan khusus untuk komoditas bawang merah, bawang putih dan kentang, ini nilainya 46,33 Miliar.

**KETUA RAPAT:**

Sekjen,

Saya mau tanya, yang di Sumut itu berapa hektar?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Yang di Sumut kalau targetnya 30.000 tetapi untuk yang ini baru 250 hektar dikerjakan oleh anggaran APBN.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang tahu tidak posisi lokasinya dimana?

Siapa yang sudah ninjau?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Pak Dirjen Hortikultura Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Coba saya tanya, itu lereng, atau bukit, atau di langit 30.000 hektar itu?

**DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):**

Sekarang yang tersedia sudah 1000 hektar.

**KETUA RAPAT:**

Yang saya tanyakan, konturnya itu yang bawang putih itu minimal harus 900 dari permukaan laut. Sekarang dipikirkan tidak dampaknya kalau longsor. Kemarin pun dilaporkan disini juga oleh Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan sudah lapor juga ke kita disini. Kalau 900 atau 1000 dari permukaan laut itu kan pasti bukit, tidak mungkin rata, tidak mungkin.

Saya setuju, setuju, saya dukung, saya dukung karena itu Bupati-Bupati Partai saya. Tapi kita harus rasional. Mungkin tidak 30.000 hektar diatas bukit? Jangan nanti kejadiannya seperti Dieng. Terpikirkan tidak, pohon ditebang dijadikan tanaman bawang putih, bawang merah, kentang. Coba pikirkanlah. Saya minta dikaji ulang lagi itu. Nah itu tanya sendiri senior saya Pak Mindo itu. Pak Mindo, mungkin tidak 30.000 hektar. 30.000 hektar diatas 1000, 900 dari permukaan laut. Mungkin tidak? Tidak adalah. Tadi kalau bilang baru 1000 ya mungkin.

Sekarang pikirkan dampak lingkungan dari dibukanya lahan seluas 30.000 hektar. Bupatinya beberapa kali ketemu saya. Saya bilang, Pak Bupati, tolong dihitung ulang, dihitung ulang. Nanti kalau longsor, anda tinggal menyalahkan. Tolong dihitung ulang.

Lanjutkan Pak Sekjen.

### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Masuk point 3 yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui program kegiatan padat karya. Ini sebesar 124 Miliar dengan rincian rehabilitasi jaringan irigasi tertier 50.000 hektar. Ini sekitar 59,73 Miliar, dan perbaikan jalan usaha tani sebanyak 497 unit sebesar 64,49 Miliar.

Selain penambahan kegiatan melalui tahun 2020, Kementerian Pertanian juga mendapat penyesuaian anggaran PNBK sebesar 60,71 Miliar dan PHLN 23,51 Miliar. Dengan adanya penambahan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan baru selesai pada akhir bulan Agustus 2020. Selanjutnya setelah terbit DIPA ABT Tahun 2020 tentunya akan segera dilakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan mulai awal bulan September. Sehingga pada akhir bulan September dapat dilaporkan pertimbangan realisasi keuangan mengacu pada anggaran baru atau anggaran penyesuaian. Totalnya menjadi 15,86 Triliun. Untuk mengantisipasi sisa waktu pelaksana anggaran Tahun 2020 yang secara efektif tinggal 3-4 bulan lagi maka Kementerian Pertanian tentunya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan baik kegiatan reguler maupun kegiatan anggaran tambahan.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Selanjutnya ijinkan kami mengantarkan penyampaian rencana program kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021. Program kegiatan dan anggaran Tahun 2021 yang kami paparkan pada kesempatan RDP hari ini telah kami sesuaikan berdasarkan masukan dari Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV DPR pada saat Raker dengan Bapak Menteri Pertanian sebelumnya. Sebagai Kementerian yang memiliki tanggung jawab penyedia pangan bagi penduduk Indonesia, maka Kementerian Pertanian akan fokus pada beberapa komoditas utama unggulan.

Yang pertama adalah sub sektor tanaman pangan. Ini terutama padi dan jagung, sub sector hortikultura untuk sayur-sayuran, aneka cabai dan bawang merah, buah-buahan, pisang, manggis, durian, mangga, lengkeng, alpukat dan jeruk, tanaman obat, jahe, hortikultura, krisan dan anggrek. Untuk peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam dan itik. Sedangkan perkebunan antara lain kopi, kakao, karet, kelapa, sagu, lada, pala dan tebu. Komoditas unggulan tersebut selain ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia, sebagian diantaranya juga diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan untuk pasar ekspor. Karena memiliki peranan penting dalam 3 hal tersebut, maka dalam rangka mencapai target program atau kegiatan seperti peningkatan produksi, nilai tambah dan

kualitas yang baik, pengelolaan dan tanggungjawab diberikan kepada Dirjen Teknis, seperti Dirjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan juga Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada masing-masing Dirjen Teknis tersebut telah merumuskan program kegiatan strategis, sebagai contoh untuk Dirjen Tanaman Pangan telah merumuskan program strategis antara lain: peningkatan produksi padi dan jagung, perbanyak benih tanaman pangan, pengendalian OPT dan DPI, persediaan Alsintan pasca panen dan pengolahan, serta pengujian mutu (suara tidak jelas). Begitu pula Dirjen Horti, Perkebunan dan PKH telah merumuskan program strategis seperti yang disajikan pada bahan RDP.

Dalam rangka melaksanakan program strategis pada Dirjen Teknis agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai terkait tanaman pangan, penyediaan bahan baku maupun ekspor maka dalam pelaksanaan program strategis tersebut mendapat dukungan dari, tentunya dari Dirjen PSP, Badan Litbang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan ESDM Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina, dan juga tidak kalah penting dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Pemaparan program strategis dari masing-masing Eselon I, baik Dirjen Teknis maupun Eselon I pendukung lainnya selengkapnya akan disajikan pada RDP hari ini.

Perlu kami laporkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis Tahun 2021 seperti telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pertanian merencanakan penganggaran sesuai pagu anggaran sebesar 21,8 Triliun yang sebelumnya 18,4 Triliun. Dalam Pagu Anggaran Tahun 2021 Kementerian Pertanian mendapat anggaran belanja tambahan untuk 2021 sebesar 34 Triliun yang diperuntukan bagi *Food Estate* di Kalimantan Tengah, ini 2,2 Triliun. Fokus nanti di Dirjen PSP. Ketahanan Pangan sebesar 1,2 Triliun, terdiri dari penyediaan pangan masyarakat 150 Miliar, ini di BKP, dan peningkatan produksi 1,03 Triliun ini tersebar di 4 Dirjen Teknis.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Dalam rangka mewujudkan tujuan pada Tahun 2021, Kementerian Pertanian juga mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus, fisik sebesar 1,4 Triliun dan non fisik sebesar 204 Miliar. Dukungan DAK fisik ditujukan untuk pengembangan renovasi sarana, dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung capaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis. Selain itu Kementerian Pertanian juga mendapat DAK non fisik sebesar 204 Miliar yang ditujukan bagi peningkatan akses pangan masyarakat, peningkatan kemandirian pangan rumah tangga, penyampaian informasi pertanian melalui pendataan, pelatihan dan pendampingan.

Rincian kegiatan yang didanai DAK fisik pada Tahun 2021 penetapannya dilakukan berdasarkan hasil pembahasan multilateral meeting dengan Bapenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementan pada bulan April yang lalu meliputi:

DAK fisik Provinsi, ini renovasi UPTD, Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana pendukungnya. Renovasi UPTD, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya. Renovasi UPTD Balai Perbenihan Perkebunan dan Sarana Pendukungnya, dan renovasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, serta sarana pendukungnya. Sedangkan DAK fisik Kabupaten.Kota, ini meliputi pembangunan jalan pertanian, pembangunan sumber-sumber air, renovasi BPP di Kecamatan dan sarana pendukungnya, pembangunan lumbung pangan masyarakat di Daerah rentan rawan pangan, dan pembangunan lumbung pangan masyarakat di Daerah sentra produksi.

Sementara itu untuk DAK fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, kegiatannya meliputi: pendampingan, pelatihan, dan pendataan pertanian penyuluh, serta pekarangan pangan lestari. Nah ini untuk DAK non fisik nanti minta masukan dari Komisi IV terkait dengan kriterianya.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Selanjutnya ijin kami melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 khusus lingkup Sekjen, bahwa Sekjen merupakan Eselon I Pendukung bagi kelancaran pemenuhan pertanian dengan arah kebijakan membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pertanian yang sesuai azas *link government* dan *good governance*.

Terkait dengan arah kebijakan tersebut, Sekjen memiliki 2 sasaran program. Yang pertama, terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dan yang kedua terkelolanya anggaran Sekjen yang akuntabel dan berkualitas. Dalam rangka pencapaian sasaran program tersebut, Sekretariat menjabarkannya dalam 12 program kegiatan, meliputi:

1. Penyusunan kebijakan program dan anggaran serta pemantauan evaluasi dan pelaporan Kementan sebanyak 625 Satker dan 11 Eselon I,
2. Pengelolaan manajemen ESDM Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebanyak 17321 pegawai,
3. Pengelolaan keuangan dan manajemen BMN Kementerian Pertanian,
4. Pelaksanaan Legislasi dan Perundang-undangan, layanan umum dan pengadaan barang jasa,
5. Koordinasi kerjasama Luar Negeri bidang pangan dan pertanian,
6. Pengelolaan hubungan masyarakat, protocol dan penyebaran formasi public bidang pertanian,
7. Pengembangan data dan informasi pertanian,
8. Penyediaan rumusan kebijakan social ekonomi dan Undang-Undang Pertanian,
9. Pengembangan perpustakaan, museum dan penyebaran teknolog pertanian,
10. Perlindungan varietas tanaman dan perijinan pertanian dan
11. Operasional perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan bagi seluruh pegawai Kementerian pertanian,

12. Belanja operasional dan rumah tangga perkantoran di Kementerian Pertanian dan belanja modal.

Dalam rangka mendukung target pelaksanaan program lingkup Sekjen Tahun 2021 telah dirancang kebutuhan anggaran sebesar 1,8 Triliun. Jika didistribusikan dalam bentuk belanja kegiatan maka presentasi anggaran Sekjen untuk belanja pegawai dan tunjangan kinerja ini 72,23%. Operasional dan rumah tangga perkantoran 7,50%, kegiatan kesekjenan 16,75%, dan belanja modal sekitar 3,25%.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan RDP hari ini. Atas perhatian Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV kami ucapkan terima kasih. Mohon ijin nanti Eselon I diberi kesempatan untuk juga bisa memaparkan.

*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Sekjen.

Saya mau tanya, Inspektorat Jenderal dapat alokasi berapa?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

24,5. 124 Miliar lima ratus delapan puluh satu delapan ratus tiga puluh satu. Meningkat dibandingkan sebelumnya hanya 98 (suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Tidak sampai cuma ½ persen dari nilai keseluruhan.

Jadi teman-teman Anggota Komisi IV,

Inspektorat Jenderal ini nanti kalau ke lapangan dengan dana sedemikian, dijemput, diajak makan, dibayarin hotel, dikasih oleh-oleh. Pantasan Pak Gatot ini tidak bisa bongkar kasus penyelundupan bawang Bombai kecil yang di Belawan. Belum kasus-kasus yang lainnya, ya karena anggarannya kecil begini bagaimana. Coba bayangkan, kalau dia ini ke lapangan sudah dijemput. Okelah mungkin dia punya duit, stafnya, yang mau audit, mau periksa. Dijemput, diajak makan, dibayarin hotel walaupun sudah ada uang perjalanan dinas bagaimana mau efektif, bagaimana mau rill berkata.

Saya sudah minta ini untuk periksa penyelundupan bawang Bombai kecil di Belawan, tapi sampai hari ini tidak berjalan. Saya tidak tahu siapa yang bermain disana. Selain itu pun masih banyak di Belawan itu penyelundupan. Tanjung Priuk, Surabaya. Kemarin saja Polisi ada yang

menangkap disana, Polres. Burung langka, cenderawasih dan kakatua. Bagaimana mau bekerja kalau biayanya tidak cukup. Saya minta tolong nanti direalokasi, ditambahin biayanya supaya jangan nanti makan dibayarin. Kalau dia ke Lampung sama saya, saya bayarin makan wajar karena saya tuan rumah. Tetapi kalau yang mau diperiksa dibayarin makan, itu kan sudah tidak benar.

Silakan Eselon I yang mau memaparkan. Yang paling penting 1 lagi hal, waktu Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian saya sudah berkata, tolong pending kartu tani. Karena ini menjadi biang kisruhnya sekarang ini. Hampir semua wilayah, bukan hanya Pulau Jawa, terjadi kelangkaan pupuk. Direktur Pupuk harus tanggungjawab nih, termasuk PSP-nya nih. Jangan iya-ya tapi tidak dijalankan. Jujur saya sangat kecewa. Apa yang saya katakan dalam Rapat Kerja iya-ya-ya tapi tidak dijalankan, ya kita lihat saja nanti hasilnya bagaimana. Terutama Pulau Jawa itu kan yang 60% lebih kartu taninya sudah tersalurkan. Kan waktu itu saya sudah bilang, pendinglah. Tahap demi tahap. Orang itu jangan kaget Pak. Kamu harus begini, ya kan belum tentu bisa. Ini ya kartu tani akan datang gini. Karena apa? Kartu tani ini kan uangnya masuk dulu ke Bank, betul tidak Pak Dirjen PSP? Uangnya taruh di Bank baru ada kartu tani. Nah sementara petani ini tidak semuanya kaya punya duit. Dia punya duit 10 Juta Gapoktannya, tebus dululah sedikit uang kontan. Jangan terlalu kaku, peraturan itu yang buat manusia. Itu dulu yang saya mint.

Silakan Sekjen, Eselon I.

#### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Saya minta Dirjen TP, jangan lebih dari 5 menit.

#### **DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):**

Terima kasih Pak Sekjen.

Bapak Pimpinan, dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dirjen Tanaman Pangan menyampaikan sesuai data yang diminta. Yang pertama realisasi anggaran 2020 (tolong slide 5). Kami sampaikan tadi ditayangkan Pak Sekjen Dirjen Tanaman Pangan dengan pagu 3,7 Triliun, realisasi 53% Pak, kemudian kalau ditambah standing kontrak itu 23% sehingga total SP2D dan *out standing contract* sudah 75%. Nah tadi disampaikan juga ada tambahan ABT 2020 yang sekarang posisinya sedang CPCL persiapan kegiatan.

Selanjutnya secara detail capaian fisik realisasi (slide 7) bantuan untuk pengembangan padi, dari target 2,6 juta hektar sudah realisasi 55% (slide 7), kemudian jagung 1,4 juta hektar sudah realisasi 61% realisasi fisik, kemudian kedelai dari 80 sudah realisasi 32 atau 40 persen, yang lainnya 54 sampai 67 persen (slide 7).

Kemudian untuk 2021, Dirjen Tanaman Pangan mendapat alokasi (slide 11), ini masih realisasi 40% fisik. Nah ini realisasi fisik padi. Ini per Eselon II, padi, jagung, kedelai.

Pagu 2021 Dirjen Tanaman Pangan sebesar 4,8 Bapak Pimpinan. Kami hitung akan berdampak pada peningkatan produksi untuk padi yang akan dikembangkan 2,8 Juta hektar akan berdampak pada produksi sekitar 14 juta ton BKG dan menyerap tenaga kerja sekitar 11 Juta petani. Ada tambahan ABT untuk pengembangan padi sebesar 170.000 hektar, itu untuk meningkatkan produktivitas terutama di daerah-daerah yang produktivitasnya masih dibawah 4%, dan untuk pengembangan padi bio fortifikasi yang kayak nutrijing untuk menangani daerah stanting. Ini di lokasi-lokasi yang rawan pangan dan stanting.

Kemudian pada baris Nomor 3, pengembangan jagung tahun ini 1,4, 1,6, ini sekarang 1,8 juta hektar dengan pagu sekitar 1,3 Triliun akan berdampak sekitar 10 juta jagung dari target nasional 2021: 23 juta ton. Untuk pengembangan kedelain 150.000 hektar akan berdampak pada produksi sekitar 200.000 ton, menyerap tenaga kerja sekitar 600.000 petani. Diluar jagung, kedelai ada pengembangan ubi kayu 35.000 hektar, ubi jalar 2000 hektar, kacang tanah, kacang hijau, umbi dan sorgum. Tadi disampaikan Pak Sekjen diluar padi, jagung, kedelai juga ada kegiatan perbanyak benih sumber tanaman pangan, uji mutu benih, pengembangan sistem perbenihan, pengendalian hama penyakit, banjir dan kekeringan serta padat karya, serta penanganan hilir baik paca panen dan pengolahan.

Tahun 2021 (slide 12), alat-alat pengolahan. Kami alokasikan 5.035 unit di slide 13.

Kemudian di slide 14.

#### **KETUA RAPAT:**

Saudara Dirjen,

Seperti saya ungkapkan kemarin, kalau tidak ada after sales servicenya lebih baik ditiadakan untuk Alsintan ini. Karena tidak ada gunanya, percuma. Putus panel sedikit digeletakin, 3 bulan rusak. Dimana tanggungjawab pabrikannya. Pak Irjen ya tolong dijawab.

#### **Plt. IRJEN KEMANTAN (Dr. Ir. SUMARDJO GATOT IRIANTO, M.S., DAA.):**

Sangat setuju Pak. Memang kita harus mulai mengevaluasi, misalnya transplanter Pak. Orang berjalan kaki di lumpur itu kalau 10 meter, kelingking jadi jempol kecuali dia bisa membuat remote yang tidak harus orang jalan di lumpur. Kemudian traktor roda 2, menurut saya juga mulai agak jenuh. Mungkin bergeser ke TR4 Pak yang untuk membuka lahan kering. Itu beberapa contoh yang mungkin harus kita pertajam lagi Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Dan saya minta kalau sebelum ada komitmen dari produsennya, untuk *after sales servise*, lebih baik ditiadakan.

**Plt. IRJEN KEMENTAN:**

Ijin Pak Ketua, nanti saya panggil Pak Ketua.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN:**

Siap Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jangan siap-siap saja.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN:**

Ya saya panggil sama Pak Irjen seluruh produsen (suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Minimal 1 Provinsi harus ada 2 mobile unit yang mengontrol peralatan Alsintan. Karena selama ini kita lihat, coba keliling kampung pasti ada jogog ada disini, disini, karena apa? Dia memperbaikinya tidak tahu. Minimal dia punya keagenan. Coba kita lihat roda 4 kan macam-macam merknya, apa standar yang digunakannya, gitu loh. Combain ada merk ini, ada merk ini, ada merk China, ada merk apa. Cobalah periksa. Dimana *after sales service*-nya, ada tidak di Daerahnya yang bertanggungjawab. Ya kalau saya di Lampung, mungkin orang Lampung kalau mau beli sparepart ke Jakarta dekat.

Nah kalau Pak Suhardi Duka, mana Pak Suhardi Duka. Dari Sulawesi Barat. Kalau ada di Makasar, kalau tidak ada di Jakarta bagaimana mau belinya. Ini yang saya tekankan lagi. Bukan masalah pembagian tetapi rakyat harus diedukasi bagaimana menjaga barang tersebut. Tolong kalau sebelum ini kasih tahu saya dulu. Kalau perlu kita batalkan, kita batalkan.

Terima kasih.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN:**

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN:**

Slide 15.

Berikut Bapak Pimpinan, Bapak.Ibu Anggota Dewan,

Sebaran per Provinsi baik untuk pengembangan padi 3 juta hektar, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, termasuk alat-alat pasca panen dan pengolahan dan pengendalian hama penyakit UPT ini sudah dirinci per Provinsi, sebagian dana ditaruh di dana tugas pembantuan, ada juga yang ditaruh di Pusat. Dan sesuai dengan target-target kami sudah membikin skenario bagaimana supaya berdampak terhadap produksi target nasional baik padi, jagung dan kedelai. Bahan sudah disampaikan di slide berikutnya, sudah membuat peta-peta kawasan komoditas andalan baik kawasan utama, kawasan andalan maupun pengembangan baik padi, jagung dan kedelai sebagaimana ditanyakan Ibu Kiki waktu lalu dan sudah kami bagikan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Hermanto ingin ngomong.

Silakan Pak.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E, M.M.):**

Terima Kasih Pak Ketua.

Ini memang terkait dengan apa yang Pak Ketua sampaikan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi memang alat mesin pertanian kita ini kan sudah tersebar merata. Artinya kita memang 1 sisi bersyukur bahwa petani sekarang ini sudah menggunakan mesin sebagian, untuk yang sebagian juga belum. Tapi kenyataannya memang, saya menemui ya secara langsung. Ada satu merk tertentu disitu, baru sekali pakai itu mesin yang apanya itu pecah dekat, pecah dan itu kan tidak bisa diperbaiki disana, mau dibalik lagi juga ribet.

Kemudian juga terkait dengan track daripada combain ya, nah itu pecah, rusak, dan juga banyak hal yang lain terkait dengan soal technical yang rusak-rusak itu. Memang kita membutuhkan suatu bengkel mobile istilahnya. Jadi bengkel yang berjalan, ya tentu menunjang adanya kerusakan, dan juga harus disiapkan after self service-nya. Jadi semacam sparepartya itu harus cukup. Kalau misalnya mesin petani ini sudah rusak, itu dia enggak untuk membetulkan karena sudah terbayang oleh mereka ini biayanya besar. Juga perlu waktu ke satu tempat. Nah ini sekedar mendukung saja Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Hermanto.

Sekjen lanjutkan, siapa lagi?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Saya minta Dirjen PSP.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pak Ketua Komisi, dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati, kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak.Ibu sekalian, Selamat pagi, dan Salam sejahtera buat kita semua.

Terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung ke halaman 5. Ini kami sampaikan rancangan kegiatan dan anggaran Dirjen PSP Tahun 2021, Dirjen PSP mendapat anggaran di 2021 ini sebesar 5,2 Triliun Rupiah, dengan rincian dukungan manajemen untuk teknis lainnya dan dukungan teknis Dirjen PSP sebesar 335,6 Miliar Rupiah. Rinciannya layanan dukungan manajemen Eselon I 90,076 Miliar, kemudian layanan sarana dan prasarana internal 7,071 Miliar, kemudian layanan dukungan manajemen Satker untuk 33 Provinsi dan 521 Kabupaten.Kota ada 196,15 Miliar Rupiah, kemudian layanan perkantoran ada 42,3 Miliar Rupiah.

Kemudian kaitan dengan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Disini ada jaringan irigasi tersier, satuannya unit. Ini sesuai dengan standar yang ada di PU. Jadi waktu pembahasan menggunakan standar unit. 1 unitnya itu 50 hektar. Per hektarnya 82 juta 700 sehingga ketemu 366,7 Miliar Rupiah. Kemudian irigasi perpompaan juga satuannya unit 128 juta per unit. Jadi ketemunya 141,4 Miliar Rupiah, kemudian embung pertanian 600 unit kali 120 juta Rupiah. Ketemunya 72 Miliar Rupiah.

Kemudian ada dan evaluasi untuk 33 Provinsi 25,031 Miliar Rupiah. Irigasi perpipaan 110 juta kali 138 unit sebesar 15,18 Miliar Rupiah, dan survey investigasi dan irigasi pertanian 6,18 Miliar Rupiah. Kemudian untuk perluasan dan perlindungan lahan pertanian ini sebesar 2,026 Triliun Rupiah. Rinciannya optimasi lahan, ini ada 130.000 hektar. Ini konsentrasi dilahan rawa. Satuannya kilometer sesuai dengan standar yang ada di PU. 1 kilometer itu setara dengan 100 hektar. Harga satuannya 4,6 juta Rupiah per hektar. Jadi ketemunya 599,853 Rupiah.

Kemudian bimbingan monitoring evaluasi untuk 33 Provinsi 20 Miliar Rupiah, kemudian pengembangan dan atau rehabilitasi jalan usaha tani ini ada 529 kilometer. 1 kilometer itu 1 unit.

**KETUA RAPAT:**

Saudara Dirjen saya mau tanya, untuk infrastruktur *Food Estate* ini anda yang mengerjakan atau PU yang mengerjakan. Karena info dari Ketua Komisi V yang mengerjakan infrastrukturnya PU. Saya minta penjelasan. Nanti tolong dijelaskan supaya teman-teman tahu, karena kalau ada tumpang tindih saya tidak mau itu terjadi. Nanti pun setelah ini saya cek dengan Ketua Komisi V.

Lanjutkan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Siap Pak.

Kemudian kita lanjutkan, untuk percepatan pengolahan pertanian ini ada 13.500 hektar. Inia da 37 Miliar, kemudian pemetaan lahan pertanian, ini kaitan dengan kegiatan basis data untuk lahan baku sawah. Adalah data spasial, ini di 7 unit atau 7 Provinsi ada 7,6 Miliar. Kemudian rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan (LP2B) ini Tahun 2021 diharapkan ada minimal ada 17 rekomendasi senilai 27,9 Miliar Rupiah. Kemudian pengembangan *Food Estate*, ini kaitan dengan ekstensifikasi lahan per hektarnya 16 juta 500 ini untuk 2021 ini ada ekstensifikasi nilainya adalah 1,2 Triliun Rupiah. Jadi ekstensifikasi ini 16.500.000 Rupiah per hektar. Kemudian intensifikasi lahan dibantu pengolahan lahan untuk ada 55.456 hektar, jumlahnya rupiah. Mungkin kami jelaskan disini bahwa sesuai data PU itu ada eks lahan gambut, ada lebih kurang 164.000 hektar. 85.000 itu intensifikasi dan 79.000 itu ekstensifikasi. Untuk intensifikasi tahun ini sedang dikerjakan 30.000 hektar dan sisanya masuk di 2021.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Pak Ketua boleh interupsi?

2021 berapa Pak?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Untuk intensifikasinya 55.456 hektar.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Kalau ekstennya?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Ekstensinya 73.500.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Oke.

Thank you.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Kami lanjutkan Pak Ketua.

Kemudian untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Ini disini ada pengelolaan sistem penyediaan dan penguasaan alat mesin pertanian. TR2 itu ada 5700 unit, senilai.

**KETUA RAPAT:**

Dirjen, saya ingatkan. Ini sama dengan yang tadi PSP. Kalau tidak ada *after sales service* minimal Januari ini lebih baik kita batalkan, karena saya tidak mau buang-buang negara. Kalau perlu pengusahanya kita panggil, buat surat pernyataan didepan Sekjen dan irjen bahwa mereka sanggup membuat kantor perwakilan dan *mobile after sales service*. Ini tolong dicatat ini.

Lanjutkan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Baik Pak Ketua.

Terima kasih sarannya.

TR4 ada 420 unit, 168 Miliar, pompa air 6000 unit, 140 Miliar Rupiah, ada 250 unit 18,5 Miliar, cultivator 3000 unit 54 Miliar, dan sprayer 6584 unit senilai 6,5 Miliar Rupiah, kemudian, monitoring dan evaluasi, alat mesin pertanian untuk 33 Provinsi senilai 18,78 Miliar Rupiah. Kemudian ada perbengkelan. Ini membuat perbengkelan pertanian 18 unit senilai 13,2 Miliar Rupiah. Kemudian untuk fasilitasi pupuk dan pestisida, kaitan dengan RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi untuk 10 juta petani anggarannya 94,12 Miliar Rupiah. Bimtek, monitoring, untuk 33 Provinsi 15,1 Miliar Rupiah, verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi 486 layanan, itu 52,5 Miliar Rupiah. Kemudian untuk UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) ada 11000 unit senilai 223 Miliar Rupiah. Untuk saprodi intensifikasi dan ekstensifikasi, ini mendukung *Food Estate* Kalimantan Tengah. Ini saprodi *Food Estate*, disini ada 128.956 hektar.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang yang 2021 ada mencapai 128 ribu?

Ada?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Iya. 79.000 ditambah 55.500.

**KETUA RAPAT:**

Bisa?

128.000 hektar bisa untuk food estate ini?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Iya. Jadi 79 ekstensifikasi, kalau yang 55.000 yang intensifikasi.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak yakin ini bisa. Kalau mencapai 128.000 hektar itu tidak mungkin. Sekarang saja yang baru dikerjakan berapa. Cobalah, 2020 saja baru berapa puluh ribu hektar, paling top 20.000 hektar. Ini kok bisa 128.000 hektar.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Ijin Pak Ketua, untuk 2019 untuk 5 Provinsi kami mengerjakan lebih kurang 262.000 hektar.

**KETUA RAPAT:**

Bapak baca disitu, mendukung *Food Estate* Provinsi Kalimantan Tengah 128.950 hektar. Jangan bilang 5 Provinsi, ini kan anda lihat dong.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Iya, pengalaman. Iya siap.

Mungkin kami jelaskan sedikit Pak Ketua, untuk yang 55.000 itu kan hanya bantuan saprodi saja Pak Ketua. Yang ekstensifikasinya hanya 79.000 Pak untuk 2021.

**KETUA RAPAT:**

Nanti saya minta tolong secara detail termasuk saprodi nya.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Siap Pak.

**KETUA RAPAT:**

Saya bukan bodoh loh, saya ingatkan ya. Saya tidak bodoh. Sekali lagi saya ingatkan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Ya? Itu saja.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Kita lanjutkan.

Kemudian peyediaan saprodi mendukung peningkatan ini di luar Kalteng Pak Ketua, ada 617.538 hektar ini bentuknya pupuk hayati cair atau organic cair senilai 2,6 Miliar Rupiah. Kemudian kaitan dengan fasilitasi.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, masalah pupuk cair. Pak Irjen, menurut anda layak tidak? Jawab jujur. Pupuk cair 200 Miliar lebih.

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

Mohon ijin Pak Ketua.

Saya kira harus dilihat kandungan haranya dan kemampuan produsennya untuk memproduksi. Karena saya belum tahu, mari kita bedah nanti Pak Ketua berkenan ini Pak Dirjen menyampaikan, barangnya itu seperti apa karakteristiknya dan produsennya mampu tidak menghasilkan itu. Karena kan ini harus diproduksi dengan waktu yang tidak panjang, dan yang kedua ini kalau bawanya tidak tepat bakterinya berkurang nanti jadi masalah.

Demikian Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ingat kan kasus dulu kan yang kita stop kan? Iya kan? Waktu itu Pak Gatot ngotot kan minta di stop, nah ini jangan sampai terulang lagi, itu saja. Nanti saya tolong dijelaskan.

Lanjut.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Terima kasih Pak Ketua.

Kita lanjutkan. Kaitan dengan fasilitasi pembiayaan pertanian, ini untuk 1 juta hektar ini 150,9 Miliar Rupiah. Kemudian untuk asuransi usaha ternak sapi dan kerbau untuk 150 ribu ekor 26,9 Miliar Rupiah, kemudian MSPK, Bimtek dan seterusnya 33 Provinsi 27,5 Miliar Rupiah. Kemudian pengembangan fasilitas pembiayaan mendukung korporasi petani ada 30 Miliar Rupiah. Kemudian kegiatan PHLN ini dari rekening khusus Pak Ketua untuk project MSRB ada 8,5 Miliar Rupiah, kemudian project 70 Miliar Rupiah ini dari dana RK untuk 14 kelompok.

Kemudian lanjut, ini mungkin penjelasan dari tadi yang dimaksud Pak Ketua kaitan dengan dukungan *Food Estate* Kalimantan Tengah, ini 2,2 Triliun Rupiah. Ini bantuan saprodi intensifikasi untuk benih itu 55.456 hektar, dosisnya 50 kilogram karena ini.

**F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Interupsi Pak Ketua.

Mau nanya, apakah anggarannya ini itu diluar yang kita sudah disampaikan sebelumnya?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Sudah didalam Pak.

**F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Sudah didalam sini.

Terima kasih Pak Ketua.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Tadi yang penjelasan Pak Ketua maksud. Ini 50 kilogram per hektar biasanya kan 25 sampai 30 biasanya menggunakan tabur atau drone. Kemudian dolomite ini 1000 kilogram per hektar, dananya 94,275 Miliar, pupuk hayati disini 5 liter per hektar 17,19 Miliar Rupiah, kemudian urea 200 kilogram per hektar 63,2 Miliar Rupiah, NPK non subidi tentunya 250 kilogram per hektar dananya 113,6 Miliar Rupiah, kemudian ada herbisida 4 liter ini harga satuannya 56 ribu dananya 12,42 Miliar Rupiah. Kemudian bantuan pengolahan Tanah untuk intensifikasi 55.456 hektar, ini harga satuannya 900 ribu, ketemunya 49,9 Miliar Rupiah. Kemudian Survey Investigasi dan Desain Ekstensifikasi (SID) untuk 73.500 tadi awalnya 79, kemudian setelah di validasi dengan PU hanya bisa di 73.500 hektar ini kali 500 ribu 36,

**KETUA RAPAT:**

Coba, saya agak tidak mengerti. Ekstensifikasi itu apa? 73 ribu hektar. Coba.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Jadi ekstensifikasi itu lahan-lahan XPLG yang sudah menyemak kembali, jadi kalau Bahasa terangnya itu sama dengan pencetakan sawah. Hanya ini karena di rawa jadi bahasanya optimalisasi lahan rawa sesuai dengan Bahasa dari.

**KETUA RAPAT:**

Ini 2021?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Iya 2021.

**KETUA RAPAT:**

Seluas 73 ribu hektar?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Iya, 73 ribu hektar.

**KETUA RAPAT:**

Jadi sebelum itu sudah disiapkan benihnya, begitu? Kan diatas ada benihnya. Ada benih, dolomite, apa segala macam, apakah 75 ribu hektar ini. Pertanyaan saya, apakah 75 ribu hektar ini dapat dikerjakan setahun? Coba, saya ini orang kebun. Saya sangat paham masalah buka kebun, kelapa sawit pun beda-beda tipis. Bisa tidak 75 ribu. RKT-nya bagaimana, rencana kerja tahunannya? Kira-kira bisa tidak? Ini loh yang kadang-kadang tidak masuk akal, dan lebih tidak masuk akal lagi kira-kira nih, kira-kira teman semua nih membawa dolomit 5,5 juta kilogram ke Kalimantan Tengah pakai apa?

Lanjutkanlah, nanti kita bahas. Kalau perlu kita tolak, kita tolak saja.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Siap Pak Ketua.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Pak Ketua, saya minta klarifikasi Pak Dirjen. Ekstensifikasi tadi sudah disampaikan itu sama dengan biaya cetak sawah barulah kira-kira sama. Berapa alokasi dulu Pak cetak sawah baru Pak?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Dulu 16 juta 500. Jadi kita samakan Pak.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Cetak sawah 16 Juta, artinya di Kalimantan itu 16 Juta.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Iya. Kalau standar PU sebetulnya 24. Hanya kita samakan ke cetak sawah.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Oke, saya hanya mau tanyakan itu sebenarnya.

Terima kasih.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Kita lanjutkan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar. Pak Gatot., yang kerjasama sama TNI berapa 1 hektar? Masih kosong-kosongan. Terakhir kalau tidak salah Cuma 12 juta.

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

16 Juta untuk wilayah barat, 18 juta wilayah timur.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang ini kan bukan cetak sawah loh, sudah ada sawah loh.

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

Ketua kalau boleh, mungkin Pak Dirjen menyaksikan peta *land cover*-nya seperti apa sih isinya, apakah ini (suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Saudara Dirjen,

Anda ngomong beda, kehutanan beda, Badan Restorasi Gambut beda, betul tidak? Setiap laporan beda. Ini sudah jadi, tinggal laporan irigasi. Ini sudah jadi sekian puluh ribu. Saya tidak tahu, mana yang benar, mana yang salah. Mungkin saya yang bodoh tidak ngerti. Jadi tidak bisa memahami apa ini semua. Yang saya tahu, apakah mungkin 5,5 juta kilo dolomit dari Pulau

Jawa di bawa kesana, dan saya sudah tahu pemenangnya siapa. Sudah tahu saya. Yang bakal menang itu sudah tahu dan itu sudah ada temuan BPK sebelumnya.

Lanjutkan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):**

Pak Ketua interupsi.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Baik Pak Ketua.

Jadi yang dimaksud perbaikan irigasi itu yang sekarang kita laksanakan itu yang 900 ribu Rupiah per hektar itu, itu untuk intensifikasi yang 55.456. Jadi itu disamping pengolahan lahan juga kita memperbaiki jaringan-jaringan tertier yang perlu di normalisasi. Kira-kira begitu. Kemudian yang 75 ribu hektar itu memang disana sudah tumbuh pohon besar dan ada semak-semak belukarnya seperti yang disampaikan Pak Irjen tadi. Mungkin itu Pak Ketua. Kita lanjutkan sedikit.

Kemudian untuk ini ada bantuan saprodi ekstensifikasi untuk 73.500 ini dananya sekitar 435,4 Miliar Rupiah. Rinciannya ada dolomit, ada benih, pupuk hayati, urea, npk, dan herbisida. Kemudian pendampingan food estate satu paket itu ada 21,7 Miliar Rupiah. Kemudian peningkatan produktivitas di luar Kalteng, ini ada optimalisasi lahan rawa 30 ribu hektar kali 5 juta ada 150 Miliar Rupiah. Kemudian pendampingan optimalisasi lahan rawa di luar Kalteng itu ada 1,8 Miliar Rupiah.

Kemudian kita ke halaman 9, kami sampaikan disini. Ini kami menyampaikan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSP Tahun 2020 sampai saat ini mencapai 52,33%. Tentunya dengan harapan bahwa sampai dengan akhir September ini bisa mencapai 70%.

Mungkin itu Pak Ketua, Bapak-Ibu sekalian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.

*Wasalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto tadi mau ngomong, ngomong dulu.

Setelah itu Pak Haerudin.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya hanya ingin mengkonfirmasi saja ini. Anggaran untuk food estate ini secara globalnya adalah 104,2 Triliun, dan itu teralokasi disini, itu adalah sebesar 2,2 Triliun untuk Kalimantan Tengah. Nah tapi kan ini food estate ini kan bukan hanya di Kalimantan Tengah ya, ada di tempat lain kan? Hanya di Kalimantan Tengah saja? Makanya saya mau konfirmasi dulu.

**KETUA RAPAT:**

Ini khusus Kalimantan Tengah Pak Hermanto. Beda sama yang Sumsel, yang di Sumut beda.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):**

Saya mau konfirmasi saja. Kalau memang iya berarti ini kan, pertanyaan saya ini kan ada Kementerian-Kementerian lain juga yang ikut serta didalam hal untuk membangun food estate ini, ada PUR-nya, terus ada juga sebagiannya itu di kewenangannya Kementerian Pertahanan Keamanan. Nah saya ingin tahu, apakah ini ada terjadi double anggaran atau tidak antara Kementerian-Kementerian ini. Karena saya memandang bahwa food estate ini sebenarnya pandangan saya itu tidak efektif, dan ini adaah kalau tidak ada koordinatif yang baik terhadap program dan anggarannya ini bisa mubajir. Saya cenderung apa yang disampaikan Pak tadi ya kita batalkan saja.

Demikian Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Haerudin.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, Anggota yang saya hormati,  
Pak Sekjen beserta para Eselon I Kementerian Pertanian yang saya hormati,

Ketua, saya ingin sampaikan berkaitan dengan masalah intensifikasi sawah tadi yang oleh Pak Dirjen PSP disampaikan. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pikiran kita waktu kita Rapat Kerja. Kita ini hari ini menghadapi situasi yang sulit, anggaran terbatas, besok hari kita menghadapi kelaparan. Saya berharap begini Pak Sekjen, anggaran ini semua pro situasi sulit. Jadi pikirannya bukan berpikir yang bagaimana yang jauh tapi yang pendek nih yang besok selamat nih kelaparan tahu tempat kita. Dengan kondisi kita yang serba terbatas. Kalau kita pikirannya di Banggar kemarin hanya untuk membuat proyeksi saja Triliun sudah susah kita karena pendapatan pajak kita terjun 40%. Darimana kita mau buat ini. Kita boleh membuat keputusan besar tapi kondisi kedepan jangan sampai kesulitan. Saya ingin sampaikan begini Pak Dirjen, ekstensifikasi itu jauh lebih penting apa yang kita sampaikan waktu Raker. Gerakan lahan-lahan PTPN, konsentrasi kita menyelamatkan perut rakyat kita yang 270 juta in. Cetak

sawah setahun belum tentu jadi produktif kembali agar bertahan hidup orang banyak kita yang ada di bangsa kita ini.

**KETUA RAPAT:**

Pak Haerudin, tadi 73 ribu bisa 2021 setahun.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Ya itu kan tidak yakin semua. Itu baru cetak sawah saja, belum tentu ditanam langsung, dan belum tentu 2021 kita langsung panen. Tapi kalau PTPN kan tidak usah dibuat, rakyat digerakan disitu buat kelompok tani sudah selesai. Saya sampaikan, ada banyak Dirjen kita yang jadi Komisariss-Komisaris di BUMN, mitra Komisi IV ini kenapa susah komunikasinya. Saya sampaikan ini. Kalau punya keberpihakan pro kondisi kita yang serba sulit ini, artinya kita ini peduli terhadap kondisi bencana Covid ini, apa yang jangka pendek yang besok hari itu 3 bulan kita bisa makan semuanya.

Nah ini yang ingin kami sampaikan. Kalau cetak sawah anggarannya besar, terus posisinya kita punya jangka panjang bagus, tapi untuk besok kita kesusahan. Tolong dikaji ulang kembali mungkin sebelum kita keputusan Pak Ketua. Ini bayak yang dievaluasi agar kedepan ini anggaran betul-betul pro ke bencana kita hari ini itu menyelamatkan perut rakyat kita.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Pak Sekjen lanjutkan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Dirjen Horti.

**DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):**

Terima kasih.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yang kami muliakan Pak Ketua Komisi,  
Bapak.Ibu Anggota Komisi IV yang terhormat,  
Pak Sekjen dan seluruh Eselon I.

Perkenankan kami mempresentasikan terkait dengan rencana kegiatan pengembangan hortikultura Tahun 2021.

Lanjut ke slide 2. Jadi program dan sasaran pengembangan hortikultura Tahun 2021 yaitu ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan sasaran meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis

dalam negeri. Yang kedua, tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan, dan yang ketiga, terkendalinya serangan OPT dan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman hortikultura. Program yang kedua peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran tersedianya produk hortikultura bernilai tambah dan yang kedua meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional. Yang ketiga programnya adalah hubungan punishment dengan sasaran seperti yang dalam paparan.

Slide berikutnya. Pengembangan hortikultura, ini kita fokuskan pada penyediaan perbenihan yaitu produksi benih bermutu, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih dan sarana-prasarana perbenihan, serta tata kelola produksi ramah lingkungan dengan program dengan kegiatan pengendalian OPT ramah lingkungan, dan penanganan dampak perubahan iklim. Ini mendukung kawasan komoditas untuk sayuran, buah, florikultur, tanaman obat. Dan targetnya adalah untuk mendukung ketahanan pangan yaitu peningkatan produksi, ketersediaan stok produk, stabilisasi harga, untuk distribusi produk, sewa gudang, pasar tani dan hilirisasi bahan baku industry berupa fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan mendukung ekspor berupa fasilitasi pengembangan pemasaran dan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Lanjut slide berikutnya. Pengembangan kawasan komoditas hortikultura yaitu kita punya kegiatan yang disebut sebagai gerakan mendorong daya saing dan ramah lingkungan hortikultura berupa pemantapan produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga, pengembangan kawasan skala ekonomi, peningkatan produktivitas melalui efisiensi usaha tani dan ramah lingkungan. Mendorong KUR komoditas prioritas ekspor perbaikan sifat fisik dan kimia tanah dan pengembangn komoditas dengan pola kemitraan.

Saya lanjut ke slide 11. Untuk rancangan anggaran Dirjen Hortikultura Tahun 2021 berupa, pertama peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat senilai 261 Miliar. Ini dengan kegiatan kawasan aneka cabai seluas 8.550 hektar, kawasan bawang merah seluas 6.500 hektar dengan anggaran 60 Miliar, kawasan bawang putih seluas 5.000 hektar dengan anggaran 80 Miliar, kawasan tanaman obat seluas 600 hektar dengan anggaran 4,8 Miliar, kawasan sayuran daun dengan luas 750 hektar dengan anggaran 6 Miliar, kawasan kentang 650 hektar dengan anggaran 5,2 Miliar, kawasan jamur ada yang 10 bubung dengan anggaran 1 Miliar. Pengembangan system hortikultura senilai 129,9 Miliar yaitu dengan kegiatan area pengendalian organisme pengganggu tanaman seluas 28.240 hektar senilai 117 Miliar, area penanganan dampak perubahan iklim seluas 225 hektar dengan anggaran 6,7 Miliar, penerapan pengendalian hama terpadu untuk 100 kelompok senilai 5,38 Miliar. Untuk peningkatan buah dan florikultura ini ada kawasan pisang 1580 hektar senilai 33,1 Miliar, kawasan manggis 1300 hektar 9,7 Miliar, kawasan durian 1980 hektar senilai 15,4 Miliar, kawasan manga 1300 hektar senilai 9,2 Miliar, kawasan kelengkeng 1.530 hektar senilai 15,9 Miliar, kawasan alpukat seluas 1000 hektar senilai 7,7 Miliar, kawasan jeruk seluas 630 hektar senilai 11,4 Miliar dan kawasan buah lainnya salak, buah naga,

melon, papaya seluas 570 hektar senilai 16 Miliar, dan kawasan florikultura anggrek, krisan, mawar, melati dan lain sebagainya seluas 20 hektar senilai 24,7 Miliar. Untuk pengembangan system perbenihan hortikultura yaitu sertifikasi dan pengawasan benih hortikultura sebanyak 10.500 produk senilai 15,5 Miliar, benih umbi atau rimpang hortikultura 7258 ton senilai 268 Miliar, benih batang hortikultura 4 juta 924 batang senilai 47 Miliar, benih hortikultura lainnya 35 paket senilai 7 Miliar, dan prasarana perbenihan hortikultura ... senilai 1,9 Miliar.

Lanjut. Rancangan anggaran Dirjen Hortikultura untuk pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, ini senilai 67,26 Miliar dengan rincian dukungan peningkatan mutu produk senilai 17,7 Miliar dengan rincian untuk registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura untuk 400 kebun senilai 1,2 Miliar. Penerapan *Good Agriculture Practice* untuk 200 kelompok senilai 6,9 Miliar, sertifikasi *Good Agriculture Practice* untuk 150 unit, ini ada 4,5 Miliar, untuk sertifikat organik ada 50 unit ada 1,5 Miliar, penerapan *Good Handling Practice* untuk 60 kelompok senilai 1,8 Miliar, dan registrasi bagsal pasca panen sebanyak 60 unit senilai 1,8 Miliar. Untuk dukungan pemasaran hortikultura berupa promosi produk-produk hortikultura 3 paket senilai 3 Miliar, bantuan distribusi 1 paket senilai 5 Miliar, untuk sewa gudang 1 paket senilai 2 Miliar, pasar tani ada 100 unit senilai 4 Miliar, prasarana pemasaran hortikultura 40 unit senilai 3,5 Miliar, dan informasi pasar komoditas hortikultura 205 Kabupaten. Kota senilai 2,7 Miliar. Dukungan peningkatan nilai tambah berupa sarana-prasarana pasca panen dan pengolahan bawang untuk 46 unit senilai 5,3 Miliar, sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan cabai untuk 36 unit senilai 4,4 Miliar, sarana-prasarana pasca panen dan pengolahan sayuran lainnya sebanyak 50 unit senilai 5,9 Miliar, dan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan buah-buahan sebanyak 98 unit senilai 13,49 Miliar.

Demikian rancangan kegiatan hortikultura untuk Tahun 2021.

Terima kasih.

*Wabillauhitaufiq Walidayah,*  
*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Saya hanya menanggapi, bagaimana perihal wajib tanam. Sampai hari ini tidak ada kabar beritanya lagi, yang pertama.

Yang kedua, tadi saya lihat ada 5000 hektar tanaman bawang putih dengan dana 80 Miliar. Saya minta klasternya dipisahkan.

Yang ketiga Saudara Dirjen pernah berkata disini, yang mendapat RIPH tidak menjalankan kewajiban tanam dan tidak mengadakan impor akan dicabut RIPH-nya. Saya minta penjelasan nanti sekalian serahkan dokumennya. Karena saya lihat nampaknya 2020 yang mendapatkan RIPH belum ada yang tanam, besok ganti PT lagi.

Silakan Pak Sekjen, siapa lagi?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Dirjen PKH.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):**

Pak Ketua, bisa saya mengkonfirmasi dengan ... (suara tidak jelas).

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc.):**

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*  
Selamat siang, Salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Pak Ketua Komisi dan jajaran Pimpinan, serta Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Kami ijin untuk menyampaikan program dan anggaran Tahun 2021. Langsung ke slide 6. Untuk Tahun 2021 total anggaran di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 2,082 Triliun dengan komposisi program dan kegiatan meliputi penyediaan benih dan bibit, serta peningkatan produksi ternak sebesar 1 Triliun 62 Miliar. Yang kedua adalah kegiatan produksi pakan 121,8 Miliar.

Kemudian pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan 189,5 Miliar, kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat 45,69 Miliar. Kemudian program nilai tambah dan daya saing sebesar 83,4 Miliar. Dukungan manajemen 416,8 Miliar. Kemudian kami mendapatkan tambahan anggaran sesuai surat edaran bersama pagu anggaran sebesar 163 Miliar untuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah dan peningkatan produktivitas dan unggas lokal. Sehingga total keseluruhan sebesar 2,082 Triliun. Rincian dari masing-masing program dan kegiatan kami telah sampaikan kepada Bapak.Ibu.

Berikut rencana alokasi kegiatan utama telah kita bagi per Provinsi.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Pak Ketua, klarifikasi sedikit Pak Ketua.

Boleh?

**KETUA RAPAT:**

Tunggu selesai ini dulu, sebentar.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:**

Rencana alokasi kegiatan utama telah kita susun berdasarkan Provinsi dan komunitas kegiatan utama, dimana seluruh Provinsi telah kami paparkan dalam slide kami, dan tentunya kami akan membutuhkan arahan lebih lanjut dari Bapak Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota.

Satu lagi untuk slide 11, untuk realisasi anggaran Tahun 2020 dengan pagu setelah penghematan sebesar 1,1 Triliun. Berdasarkan dari SP2D sudah 54,92%, dan realisasi aktual per 2 September adalah 59,76%.

Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI. Untuk itu kami mohon arahan lebih lanjut.

Terima kasih.

*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Lanjut dulu ya?

Iya lanjutkan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kepala Badan Karantina.

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN (Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Sekjen.

Ijin Pak Ketua yang kami hormati,  
Bapak.Ibu semua Anggota Komisi IV yang berbahagia.

Ijinkan kami terkait dengan kegiatan di Karantina.

Mohon ijin Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua, kami sampaikan dulu terkait dengan tugas dan fungsi Barantan (Badan Karantina Pertanian). Ini sesuai dengan Undang-Undang 21 Tahun 2019 terkait dengan Karantina Hewan dan Tumbuhan, itu menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman OPTK atau HPHK melalui penyelenggaraan perkarantina nasional. Nah disini ada fungsi utama dan fungsi lain. Fungsi utama ini terkait dengan perlindungan, keamanan pangan dan pakan termasuk keamanan lingkungan yang beda di atau kita bandingkan dengan Undang-Undang yang di Undang-Undang Nomor 16. Itu terkait dengan system pengawasan dan.atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetic, sumber daya genetic, agensi hayati, tumbuhan dan satwa liar dan satwa liar.

Nah fungsi lainnya Pak Ketua mohon ijin, Bapak.Ibu semua, para Anggota yang kami hormati, itu termasuk juga terkait dengan bio dan instrument perdagangan.

Berikutnya kami teruskan dulu. Ini peta sebaran Satker Badan Karantina Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua, kita bekerja di Pelabuhan, Bandar Udara, Kantor Pos. Pos perbatasan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran. Kita punya 50 UPT operasional, 326 wilayah kerja di 957 tempat pemasukan dan pengeluaran se-Indonesia. Jadi itu terkait dengan ada tugas Permentan seluruhnya terkait dengan tugas-tugas atau tempat dimana Pejabat Karantina bekerja Pak Keta dan Bapak.Ibu semua. UPT pendukung kita ada 2, itu ada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dan UPT Pendukung Balai Uji Teknik dan Metode Karantina Pertanian.

Jumlah SDM kita Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua kami sampaikan mohon ijin, itu 5087. Itu pegawai kita yang ASN adalah hanya 3762 dan THL-nya 1325 orang.

Keterkaitan tentu dengan program kita Bapak.Ibu semua, mulai dari rencana kerja Kementerian Pertanian dan kami di Badan Karantina Pertanian dari 5 program Kementerian Pertanian ini Nomor 1 dan 5 ini, disini Badan Karantina Pertanian masuk, itu terkait dengan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen. Dua program Kementan ini Badan Karantina ada disana.

Terkait dengan kegiatan strategis Badan Karantina Pertanian yang diturunkan dari tugas seluruhnya dari Kementerian Pertanian itu yang 2 tadi ini yang 2 program ini adalah sertifikasi produk pertanian, kemudian kebijakan per karantina bidang pertanian, dan perikanan. Perikanan tentu kami tidak lakukan Bapak.Ibu semua. Seterusnya layanan sarana dan prasarana karantina. Di point ini Pak Ketua mohon ijin ada tambahan tugas kami Pak Ketua dari Bapak Menteri, itu terkait dengan Kementan Nomor 42 Tahun 2020 tentang gugus tugas, itu peningkatan investasi dan ekspor produk pertanian. Disitu ditugaskan Kepala Badan Karantina sebagai Ketua Tim Peningkatan Ekspor Pak Ketua. Jadi ada dasarnya di Kementan Nomor 42 tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak Menteri.

Seterusnya, sertifikasi produk pertanian yang tadi 3 kegiatan strategis kami Bapak Ketua dan Bapak.Ibu semua, itu terkait dengan 8 tindakan karantina ini Bapak.Ibu semua yang sudah Bapak.Ibu pasti mengetahui ini karena ini di Undang-Undang. Ini mulai dari pemeriksaan, sampai ke pembebasan. Jadi 8 ini tentunya tugas kita, mulai dari border. Disini ada kita lakukan tindakan karantina di negara asal, terus kemudian di border sudah pasti seperti yang kita lakukan selama ini, dan post border ini relative kepada pemantauan dan surveylance, monitoring terhadap HPHK, OPTK, media pembawa, sesuai dengan Pasal 27 di Undang-Undang 21 Tahun 2019. Tentunya pihak terkait disini ada, institusi perlindungan nasional. Ini ada komponen di bandara pelabuhan, pengelola bandara, pelabuhan, kemudian

komponen Hantam ada TNI-Polri, kita ada kerjasama Pak Ketua, Bapak.Ibu semua, ada juga jasa pengiriman dan pihak lainnya.

Seterusnya ini terkait dengan kebijakan perkarantinaan bidang pertanian. Ini kami 4 tentunya Pak Ketua, Bapak.Ibu semua, peningkatan system karantina hewan dan keamanan hayati hewan makanya kami ada Eselon II disini adalah pusat karantina hewan, dan terus kemudian peningkatan system karantina tumbuhan dan keamanan hayati, kita punya pusat karantina tumbuhan, terus kemudian disini peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan. Kita punya pusat KKIP namanya Pak.

Terus ini manajemen tentunya, ini peningkatan kualitas, penyelenggaraan laboratorium, uji standar dan lain sebagainya.

Seterusnya, kami masuk ke layanan sarana dan prasarana perkarantinaan. Ini yang ketiga. Ini pembangunan sarana-prasarana karantina wilayah perbatasan. Sesuai dengan Inpres Nomor 6 Pak Ketua, 7 perbatasan dan 11 perbatasan layanan perkarantinaan dan termasuk pengadaan sarana operasional ada Xray kita mintakan Pak Ketua mohon insinerator dan mungkin bio sensor kalau itu memungkinkan, dan pengadaan alat laboratorium.

Kami masuk sekarang kepada anggaran Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua mohon ijin, realisasi anggaran TA 2020 kita posisinya saat ini itu 66% sesungguhnya ini menurun sedikit karena kita merevisi PNBK Pak Ketua, ada penambahan sekitar 60M untuk revisi pertama PNBK kita. Sehingga anggaran kita dari 845 awalnya ini menjadi 906 dengan masuknya PNBK kita di revisi yang pertama. Terus target dan realisasi PNBK Tahun 2020 seperti yang kami sajikan di table yang sudah Bapak.Ibu terima saya pikir.

Terkait dengan pagu Badan Karantina Pertanian, ini sesuai dengan dukungan manajemen disini Bapak.Ibu semua, disini di point 1 ini ada operasional, dan non operasional. Operasional ini 54,73%, ini terdiri dari belanja pegawai 24,42 dan belanja barang 2423,62. Nah inilah yang membiayai ... yang pegawai kita semua tadi itu yang hampir tadi 5000 sekian orang, termasuk yang non operasional dan belanja modal untuk yang susunan hasil Raker kemarin Pak Ketua kami masukan juga di anggaran yang ada di kita beberapa pergantian atau penggantian peralatan laboratorium atau penguatan pendukung peralatan laboratorium. Termasuk tadi yang kami sampaikan ada x-ray, ada juga beberapa insinerator yang dicukupi dari anggaran yang ini. Dan termasuk non operasional untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan, itu ada belanja barang sekitar 23,36%. Totalnya itu sekarang, anggaran kita Pak Ketua di Badan Karantina Pertanian tentu harapan kita di 2021 ini adalah Rp1.016.260.837.000,00.

Terus sedikit lagi Pak, ini terkait dengan rencana programnya di 2021. Ini tadi rincian yang 1,016 tadi, ini yang program dukungan manajemen. Ini terdiri dari pelayanan perkantoran. Layanan perkantoran ada gaji, tunjangan untuk pegawai atau ASN itu khusus yang itu. Terus kemudian yang honor

THL kita termasuk pemeliharaan asset, operasional kantor untuk 53 Satker 3762 pegawai dan 1325 THL itu ada di anggaran yang tadi 528.

Terus kemudian pengelolaan perencanaan keuangan, monitoring dan evaluasi dan perlengkapan Badan Karantina Pertanian untuk 53 Satker itu 1 layanan, disitu ada 47 M. Terus kemudian layanan hukum dan humas, karena kita tadi punya 1 pusat yang menangani hukum dan humas ini, itu ada 47 M. Yang untuk layanan hukum yaitu humas itu 8 M, kemudian layanan umum organisasi dan SDM itu sekitar 48M, kemudian layanan prasarana internal dan layanan sarana internal itu ada satuannya meter kuadrat dan unit, itu sekitar 180-an sekian.

Nah ini untuk yang kedua program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (mohon maaf ini tidak terbaca). Itu ada kebijakan bidang pertanian dan perkarantinaan atau perikanan itu khusus untuk pertanian tentunya. Itu kebijakannya ada 59, itu yang dari Pusat Keahlian tadi dan termasuk KKIP itu sekitar 37M, terus kemudian sertifikasi produk itu untuk tindakan karantina, sertifikat, produk itu sekitar 1 juta kita targetkan, 1 juta kita targetkan itu 194M. Itulah disana Perjalanan Dinas Bapak.Ibu semua. Terus kerjasama kesepakatan, kerjasama tentunya itu ada sekitar 3,4, dan system informasi Pemerintahan itu sekitar 2,4M.

Nah alokasi anggaran penguatan sarana operasional perkarantinaan kami alokasikan disini Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua, untuk yang di anggaran yang 1,016 tadi itu ada untuk kelas 1 Batang, Kupang, Tarakan, Lampung, itu untuk insenilator. Kapasitas insenilator itu harganya beda, itu karena kapasitasnya berbeda, ada perinciannya di kami, ukurannya maksud kami untuk yang dialokasikan ke Kantor-Kantor kita disana. Untuk X-ray ada 2, itu BKP kelas 1 Lampung, dan kemudian Surabaya. Ya ini yang untuk 2 item yang insenilator dan x-ray. Insenilator ini mendukung tadi 1 tugas P kita itu adalah pemusnahan Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua. Kalau x-ray berarti itu di pemeriksaan, di tugas pertama tadi yang diantara 8P tadi.

Sedikit lagi, satu lagi. Ini penguatan sarana operasional yang kami mohon bantuan atau dukungan Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua, Pak Sekjen ijin. Kami mintakan sesuai dengan hasil Raker kemarin untuk penguatan peralatan, apakah itu insenilator dan x-ray. Itu kami mengusulkan sekitar 100 tambahannya untuk ditempatkan di UPT-UPT kita ini. Jadi selama ini Bapak.Ibu semua seperti diketahui kalau melakukan pemusnahan itu kita hanya ada alat di Soekarno-Hatta yang kira-kira itu tepat secara teknis. Ada di Surabaya misalnya ada di alat itu begitu. Media pembawa yang mau kita musnahkan itu masuk kita bakar, itu asap keluar lagi ke wajah kita. Ini saya bilang ini tidak benarlah nih alat ini. Ini kita mohon bantuan Bapak.Ibu semua Pak Ketua mohon ijin, sekali lagi ini mohon ini untuk beberapa UPT ini kita dahulukan di 2021 terkait dengan ini insenilator, dan kemudian 1 lagi ini untuk x-ray. Ini untuk x-ray Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua, itu untuk PKP Surabaya, Pekanbaru, Tanjung Priuk, ada 2 disana untuk yang portable dan package ini. Terus Semarang, BKP Belawan, Balikpapan, Yogyakarta, dan Cliegon.

Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan Pak Ketua dan Bapak.Ibu semua, mohon arahan dan bimbingan terkait dengan ini.

Satu lagi tadi terakhir, ini yang terkait dengan peralatan laboratorium di 52 UPT, ini sekitar 26 M kami mohonkan bantuannya Pak Ketua, Bapak.Ibu semua dan Pak Sekjen.

Terima kasih tentunya. Itu yang kami sampaikan Pak Ketua.

Terima kasih banyak.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*  
Selamat siang.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi teman-teman Anggota, Beliau ini ditugaskan oleh Menteri untuk mencari investor. Jadi mudah-mudahan nanti BKPM saya minta saran ditutup saja. Jangan menghabiskan uang untuk merayakan ekspor, tanpa Bapak juga ekspor jalan terus kok, tanpa Menteri Pertanian ekspor jalan terus kok. Orang di Lampung kopi tiap bulan, tiap tahun sekian ribu ton juga tidak ada Pejabat, tidak ada saya juga ekspor kok. Saya tuh tergelitik mendengarnya. Ekspor bungkil, sawit dari Babel. Babel itu berapa banyak, berapa luas kebun sawit tidak bakal lebih 100.000 hektar. PKS-nya pun saya tahu ada berapa. Sudahlah yang gitu-gitu tidak usahlah. Ya kalau Perment tinggal anda bilang, Pak Menteri saya mau Perment ini, tugaskan ini, ini, gampang kok. Dan ini Pak Sekjen saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan.

Tolong setiap Kementerian mengeluarkan Peraturan Menteri kami dikasih fotocopynya. Minimal kalau kami ketemu masyarakat yang bertanya, anda ini melanggar Peraturan Menteri. Ini sudah beberapa kali saya ngomong. Masa harus saya marah terus. Saya juga capek Pak, apalagi tiap hari saya mimpin sendirian disini. Iya benar. Capek hati, capek pikiran. Sudah gitu yang dikasih tahunya Cuma iya-iyanya, siap-siap doing.

Sudah cukup?

#### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Satu lagi, Irjen Bapak. 2 menit.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

#### **Pjt. IRJEN KEMENTAN:**

Terima kasih Pak Sekjen.

Pak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV.

Saya melaporkan dulu Pak Ketua. Jumat malam kami akan panggil penyedia asing pasca panen Pak. Pasca panen dulu Pak, karakteristiknya berbeda. Kami akan minta terkait kantor cabang, kemudian *mobile services* dan yang online. Jadi kalau ada pengaduan kerusakan online. Jadi kalau ada pengaduan kerusakan online diadukan lewat online karena menelpon juga tidak mudah, itu satu.

Yang kedua, saya melaporkan audit tujuan tertentu mengenai bawang putih Pak Ketua, ada 2 kondisi. Yang legal itu betul ada yang diameter 5 cm, itu populasinya kurang lebih 1%, dan itu masuk di Belawan dan Tanjung Perak. Itu saya laporkan karena Bapak tadi tidak kerjakan, saya tindak lanjuti Pak. Ini kami sedang bekerjasama dengan horti untuk merumuskan aturannya. Karena ini harus maksimum berapa toleransinya supaya ini di.

**KETUA RAPAT:**

Toleransinya di berapa senti Bawang Bombai?

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

sentimeter Pak.

**KETUA RAPAT:**

Diatas 5 senti atau dibawah?

**DIRJEN HORTIKULTURA:**

Di atas 5 senti.

**KETUA RAPAT:**

Yang kemarin masuk berapa senti?

**DIRJEN HORTIKULTURA:**

Banyak yang masuk dibawah 5 senti Pak.

**KETUA RAPAT:**

Berarti kan Karantinanya tidak bekerja. Karena apa? Mohon maaf, di Priuk sudah berapa tahun Pejabatnya, Surabaya berapa tahun, di Belawan sudah berapa tahun? Itu saja. Coba ditanya saja sudah berapa tahun, akibatnya begini.

Ya lanjutkan Pak Irjen.

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

Ijin Pak Ketua, saya mungkin melaporkan juga bahwa tadi saya waktu nunggu di ruang Pimpinan saya juga bilang sama Pak Kepala Badan Karantina dan Dirjen Horti, ini harus ada kesepakatan bahwa yang mengeluarkan RIPH kan Dirjen Horti Pak. Jadi ketika ada yang masuk dibawah 5 senti itu kan berarti Pak Kepala Badan Karantina harus menginfokan ke Dirjen Horti bahwa ini barang masuk di bawah 5 senti. Tolong dimasukan ke gudangnya pemilik baru penyidik, bukan negeri sipilnya Pak Dirjen Horti yang memeriksa, apakah statusnya mau diapakan itu kewenangannya yang mengeluarkan ijin. Begitu Pak Ketua.

Kami laporkan juga ada yang illegal juga Pak Ketua, di Aceh Tamiang, Dumai dan Bengkalis. Artinya ijin meskipun anggarannya masih kecil kami tetap bekerja Pak Ketua.

Lanjut, nanti dibilang tidak kerja takut lagi. Saya soalnya di WA Pak Ketua, katanya Irjenya takut. Apanya yang takut, kalau perlu Pak Ketua ya saya periksa. Di rumah sakit.

Pak Ketua,

Ijin Pak, kami hanya menyampaikan 2 point saja. Serapan kami 68, ya wajarlah karena Irjenkan bawa sendiri, sendok sendiri, dan nasi sendiri Pak Ketua. Jadi tidak usah dikomentari.

Lanjut. Ini tugas kami Pak Ketua audit, kemudian mitigasi pencegahan resiko, termasuk kami menilai apakah harganya wajar atau tidak Pak Ketua. Jadi karena Pak Ketua bilang harus menyelamatkan keuangan negara kami dengan tim melakukan review dengan data yang kami miliki kita memberikan opini rekomendasi catatan hasil review, ini kemahalan, atau ini sudah sesuai.

Anggarannya berapa? Ini Pak Ketua, tadi 124,5.

**KETUA RAPAT:**

(suara tidak jelas).

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

Tergantung kalau melihatnya begitu. Berapa persen kan begitu. Saya tidak minta tambah Pak Ketua, tapi ya layanannya sesuai dengan kapasitas. Nanti kalau Pak Ketua sampaikan tadi, berarti Pak Sekjen yang akan menjawab Pak Ketua.

Kurang lebih itu Pak Ketua. Saya tidak ngomong panjang, tapi sudah sedikit ngomongnya panjang, tapi saya bertanggungjawab menggunakan ini saya berpikir.

Terima kasih.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ya kalau anda tidak benar kerjanya saya minta BPK periksa anda. Terus yang kedua lagi, apakah kasus impor bawang putih tanpa RIPH sudah anda selidiki belum?

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

Kami lagi melakukan auditnya Pak Ketua. Nanti saya laporkan pada kesempatan berikutnya.

**KETUA RAPAT:**

Saya minta Rapat Kerja nanti dilaporkan.

**Pit. IRJEN KEMENTAN:**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Karena waktunya sudah lama sekali.

Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang waktunya Anggota bertanya.

Yang pertama Ibu Endang silakan. Ibu jangan bicara masalah Litbang terus Bu. Litbang juga sekarang sulit berkembang Bu.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

Saya juga bosan Pak.

Terima kasih.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pak Ketua yang saya banggakan dan saya hormati, Pak Sekjen, para Dirjen yang saya banggakan dan para Anggota Komisi IV yang saya kasihi.

Ada beberapa evaluasi dari kami terutama Sekjen. Jadi Pak Sekjen mohon para petani kita ini kan menunggu Pak. Menunggu inovasi hasil-hasil teknologi walaupun tadi Pak Ketua tidak senang dengan Badan Litbang, tapi saya tetap Pak menunggu bagaimana hasil-hasil teknologi yang ditunggu oleh masyarakat ini bisa disosialisasikan dengan baik. Kemudian panduannya Pak, panduannya itu semuanya mangkal di Sekjen. Ini menurut asosiasi dari bioteknologi.

Nah kemudian rekayasa genetika Pak. Ini sampai diambil alih oleh DPD tapi saya juga masih itu, bahwa rekayasa genetika ini sangat penting Pak untuk *Food Estate*. Nah tentu saja disini peranan Inspektorat Jenderal yang saya cintai Pak Gatot, mohon evaluasi ini diperketat, karena Dikau kan dulu kan dari Badan Litbang. Malu kita.

Nah yang kedua Pak, mengenai hortikultura. Hortikultura ini saya miris juga Pak, kalau ungkapannya tadi kan bagus-bagus tapi tadi, begitu saya minta bibit untuk para konstituen kita, itu bibitnya beda unggul. Nah ini bagaimana Pak? Jadi yang diungkapkan Bapak dengan Miliar-Miliaran itu ternyata aplikasinya belum dilaksanakan dengan baik.

Nah kemudian food estate nih Pak. Food estate ini memang tadi sudah disampaikan ada 128.956 hektar. Nah sebetulnya kita ini kan banyak sekali Pak tanah-tanah yang tidak fisible, yang dianggurkan. Nah apakah tidak bisa dibikin food-food estate kecil-kecilan disetiap Dapil karena tadi teman-teman kita yang menyebar disemua Dapil ini bisa dijadikan pengawas yang unggul.

Nah yang berikutnya tentang realisasi anggaran Dirjen PSP, yang sebanyak 56,83% tentu saja saya ingin menggarisbawahi bagaimana mekanisme pengawasannya, dan adakah data yang valid terkait dengan tingkat persoalan pupuk. Jadi jangan jauh-jauh Pak Sudin, di Cianjur saja Pak, kartu tani itu diresahkan para penyuluh. Jadi para penyuluhnya Pak kerjanya hanya input data yang datanya itu berubah-ubah karena semuanya itu bukan petani murni tapi penggarap. Nah ini harus jadi evaluasi kita bersama.

Nah yang ketiga Pak Dirjen PSP, mohon maaf ini kalau tersinggung ya. Bank Pertanian. Saya ini merintis Bank Pertanian dari Grand Bank Credit Agricole tapi dipetieskan di Kementerian Pertanian. Nah ini kan tanggungjawab moral saya Pak, karena itu dari disertasi saya, S-3 saya di Nah untuk itu saya ingin mengevaluasi lagi dan karena di Kementerian Perikanan dan LHK sudah ada BLU dari itu akan saya jadikan titik tolaknya.

Nah yang berikutnya, masih di hortikultura Pak. Saya masih agak miris dengan took tani dan pasar tani yang selalu top down policy. Bapak boleh lihat di komplek saya yang tidak jauh dari tempat tinggal Bapak Dirjen, itu sepi Pak, alang-alangnya tinggi. Nah apakah tidak bisa dipindahkan ke pasar tani yang saya bentuk dari button up. Nah kemudian tas-tas Bapak (ini nuwun sewu loh Pak) selalu evaluasi dengan SPPD, bantuannya kecil padahal Cuma 15 juta Pak. Jadi saya nombokin lebih dari itu saja bisa Pak.

Kemudian tanaman pangan. Tanaman pangan ini Cianjur dulu kan terkenal dengan beras Cianjur, tapi hilang dari peredaran. Nah mohon Pak ini digali kembali dan juga tadi beras-beras yang untuk anti stanting ini kami perlukan karena Cianjur dan Bogor ini angka stantingnya tinggi.

Nah yang berikutnya rengginang. Disana itu sangat populer rengginang yang bagus yang sudah bisa diekspor. Nah ini kan perlu benih atau bibit dari padi beras ketan. Nah ini mohon ditindaklanjuti karena banyak sekali petani-

petani kita yang membutuhkan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas tersebut, juga kedelai Pak termasuk.

Nah kemudian untuk Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan. Harga ayam ditingkat peternak ini kembali mengalami fluktuasi. Nah bagaimana usaha Pak Dirjen nih karena Ibu-Ibu, teman-teman saya ini Pak sudah mulai membuat mekanisasi diperumahannya, misalnya diungkep, kemudian dipasarkan secara online. Nah tapi saya lihat tidak ada Pemerintah hadir disini. Jadi mereka gerak sendiri. Nah mohon Pak Dirjen yang baru ini bisa memberikan fasilitas.

Nah kemudian kebijakan yang layak untuk menstabilkan harga ini apa gitu. Nah tadinya Pak saya harapkan hasil-hasil penelitian dari Balitnas itu bisa diakomodir oleh Direktorat Jenderal Peternakan. Saya kan aktif sejak Tahun '90 itu Pak. Tapi ternyata Direktorat Jenderal Peternakan itu beli bibitnya yang untuk dibagikan dari luar, kan aneh Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bu Endang cukup?

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

Oh cukup Pak.

Satu lagi Pak Karantina Pak. Jadi Karantina ini saya harapkan buah-buah tadi Pak. Jadi Pak Ketua sudah menjelaskan, mohon diantisipasi Pak buah-buah local kita yang perlu dikembangkan.

Terima kasih.

*Billauhitaufiq Walhidayah,  
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'allaikumsalam.*

Selanjutnya Pak Suhardi Duka.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*  
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siang Pak, Alhamdulillah.

Yang saya hormati Pak Ketua, dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat,

Yang saya hormati Pak Sekjen beserta dengan para Dirjen, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian.

Pada prinsipnya kita harus komitmen bahwa anggaran yang kita tempatkan pada satu nomenklatur harus terasa outputnya. Outcomenya dan dibuktikan dengan peningkatan NTP petani. Karena kalau tidak seperti itu berarti anggaran itu tidak punya manfaat, walaupun mungkin benar pada tempatnya tapi kalau manfaatnya tidak ada ya buat apa.

Olehnya itu banyak hal yang kita perlu kaji didalam penempatan anggaran ini. Saya juga ingin sampaikan tambahan bahwa kesepakatan rapat yang lalu jelas bahwa rekomendasi itu tidak menjadi tugas Anggota Dewan, tapi menjadi tugas di Kementerian. Jadi jangan lagi dikasih mengurus rekomendasi tapi tugas kami adalah memasukan CPCL. CPCL kami kasih masuk kemudian Bapak yang pengurusan dengan Dines-Dines yang ada di Kabupaten sesuai dengan persyaratan yang Bapak tentukan.

Kembali kepada anggaran, menyikapi anggaran ini. Yang pertama adalah di Kesekjenan tadi saya melihat bahwa terjadi juga peningkatan yang cukup signifikan di Kesekjenan. Olehnya itu ada beberapa anggaran yang cukup naik, ini indikatornya perlu di perjelas sehingga tidak tumpang tindih katakanlah biaya umum. Biaya umum harus seragam. Jangan beda biaya umum jadi Sekjen, beda biaya umumnya di Dirjen. Dengan demikian ini akan menyulitkan untuk pemeriksaan BPK nantinya kalau beda-beda penentuan biaya umum. Anggaran penting demi untuk audit kita selamat dan tahun ini kan Kementan auditnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian 2020 66%, saya kira masih ada waktu sekitar beberapa bulan. Kita upayakan bisa sampai dengan 100%.

Saya mulai dari Dirjen Tanaman Pangan, ini adalah intinya Kementerian Pertanian. Karena kalau ini salah ini berbahaya bagi negara. Intinya adalah harus tersedia beras degan segala bentuknya, karena Indonesia memakan nasi.

Yang kedua adalah jagung, karena jagung in sekarang ini menjadi sumber pendapatan petani. Kalau ini tidak tersedia ini tidak menjadi prioritas saya kira salah kita menempatkan anggaran di Dirjen Tanaman Pangan. Tentunya dengan berbagai dukungannya. Olehnya itu saya ingin prioritas pada 2 posisi ini yaitu padi dengan jagung. Saya melihat kedelai sejak kecil ini kedelai-kedelai terus didukung- didukung dan lain sebagainya dan saya kira juga cukup. Dengan demikian menempatkan anggaran di kedelai yang terlalu besar perlu menjadi kajian kita bersama.

Yang selanjutnya di PSP. Saya kira PSP ini adalah sumbernya cukup besar karena dari 2,5 Triliun pada Tahun 2020, naik menjadi 5,2 Triliun pada Tahun 2021. Naik kurang lebih 100% anggaran di PSP ini. Saya tentunya mendukung karena dukungan PSP itu bisa meningkatkan produksi dengan sarana-prasarananya. Hanya saja memang ada yang perlu kita kaji bersama, termasuk didalamnya apa yang disampaikan tadi Pak Ketua harga satuan. Harga satuan yang ada ini berbeda-beda. Olehnya itu saya berharap ini diperbaiki. Ekstensifikasi lahan saya kira 1,2 Triliun anggarannya ini, ini perlu diperjelas betul. Dengan 73.500 hektar. Saya juga tidak yakin dalam 1 tahun bisa kita akan mengelola melakukan ekstensifikasi langung 73.000 hektar. Ini

kita bukan perusahaan. Perusahaan saja berat untuk bisa menyelesaikan 73.500. Dengan demikian jangan sampai kalau di kita habiskan anggaran disini, kemudian juga capaiannya tidak tercapai tidak bisa memutar roda perekonomian kita. Sedangkan tema APBN tahun ini adalah pemulihan ekonomi dan reformasi social.

Kemudian saya juga sedikit menyinggung mengenai hortikultura. Saya kira ini hortikultura susah diukur kinerjanya terus terang. Karena itu juga penjual- penjual anggrek, unit-unit penjual anggrek itu bisa juga menjadi bagian daripada hortikultura, penganggarnya seperti itu. Dengan demikian pengembangan sistem perbenihan hortikultura yang memakan anggaran 349 Miliar, ini perlu penjelasan yang jelas ini. Di kemanakan anggaran ini sesungguhnya.

Yang terakhir adalah peternakan. Saya, masyarakat kita membutuhkan sapi, kambing. Dua ini tentu di wilayah-wilayah tertentu butuh babi. Jadi tiga ini saya kira yang menjadi prioritas kita Pak. Kambing, sapi, dan babi pada wilayah-wilayah tertentu. Kalau sudah ini Bapak anggarkan cukup bagus, saya kira sudah bagus peternakan, tapi kalau pakannya lebih banyak dianggarkan ketimpa dengan ternaknya maka akan kelebihan makanan tidak ada pakannya. Demikian Pak.

Terima kasih.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Syafrudin dari NTB, Fraksi PAN.

**F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):**

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pak Ketua,

Saya ke Pak Sarwo masalah kartu tani walaupun sering saya komunikasi tetapi kartu tani ini karena kita hadir semua untuk lebih mempertegas saja bahwa tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pak Sudin, kartu tani ini kalau memang ruwet banget di stop saja. Saya mungkin mewakili di Daerah Pemilihan saya di Nusa Tenggara Barat I Pulau Sumbawa bahwa ada beberapa Kecamatan yang sudah oke tapi ada yang lebih banyak yang belum oke. Nah saya tidak tahu mulai dengan proses pencetakan kartunya belum baik oleh Bank BRI, maupun Bank BNI. Jadi mungkin Pak Sarwo, Pak Dirjen, saya minta ketegasan bahwa jangan terlalu dipaksakan walaupun suratnya sudah Bapak-Bapak kirim tapi lebih tegas lagi karena kasihan orang-orang kita dibawah itu. Petaninya tidak bisa bertahan karena mereka patokan, saya tidak bisa dapatkan pupuk kalau tidak ada kartu tani.

Tapi kita paksa mereka untuk mendapatkan sementara mesin cetaknya entah dimana itu. Itu ya Pak Sarwo.

Kemudian Pak Nasrullah, Pak Dirjen. Saya appreciate ya programnya Bapak-Bapak yang 1000 sapi, atau 2000 sapi itu di Daerah Pemilihan saya di Nusa Tenggara Barat tapi sayang bukan di Dapil saya. Di Lombok, itu bukan Dapil saya di Lombok. Jadi maksud saya jangan salah-salah. Ya adalah itu manfaatnya walaupun Bapak-Bapak kan terima arahan dari Dinas, tapi dikasih tahulah. Itu kan dari 34 Provinsi kan ada 5 Provinsi termasuk Kampung saya tapi salah-salah lagi. Tapi walaupun Bapak-Bapak bilangkan Insha Allah kedepan 2021 ada.

Nah *integrated* ini yang harus cepat itu disampaikan. Jangan sampai karena saya kira di Nusa Tenggara Barat itu lebih *performance* di Pulau Sumbawa urusan sapi-sapi dan lain-lain itu. Ini kan karena ada program Moto GP saya tahu Pak Presiden harus dapat melihat pertandingan itu dan ada kegiatan kita di (suara tidak jelas). Saya maklumi itu tapi jangan terlalu berlebihan gitu loh. Dilihatlah kita ini, kan di Dapil kita, ah kadang-kadang susah Bapak-Bapak, di Dinas bilang Jakarta, Jakarta bilang di Dinas, susah.

Nah yang terakhir, Pak Sarwo lagi. Pak Sarwo, saya kan beberapa waktu yang lalu bilang ada Direktur Pembiayaan itu. Yang saya bilang Pak Sekjen, ya mohon ditegasi. Kalau ada kegiatan apa-apa kami dikasih tahu, saya dikasih tahu. Jangan dengan bangganya kar KUR, kar KUR, tidak ada bunganya nol persen. Saya tidak dikasih tahu, tiba-tiba MoU. Begitu saya bilang, Pak ini kami kerja di masa. Memang kami tidak kerja di Jumat, Sabtu, Minggu juga. Besok rapat malah jumat harusnya tidak ada rapat. Samalah kita buat bangsa dan negara. Artinya hal-hal seperti itu Pak Dirjen, kami diberi tahulah di Daerah Pemilihan supaya ada value kami dari Anggota. Nanti rakyat bilang tidak kerja gitu loh, tidak enak. Saya minta di monitor rencana Bapak-Bapak untuk melakukan KUR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebanyak 400 Miliar ditinjau kembali. Saya dikasih tahu off takernya siapa, sasarannya siapa, berapa persen, apakah dalam kondisi pandemi seperti ini pantas atau wajar kita menggelontorkan itu. Kalau Bapak-Bapak bilang wajar silakan. Kalau tidak wajar di stop, jangan dipaksakan. Jangan dipakai untuk alat kampanye, buat Pilkada.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak?

**F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):**

Cukup Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kalau masalah KUR ini, Bapak-Bapak ini tidak rugi karena bukan uang dia.

**F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):**

Yang rugi kita Pak Ketua.

Terima kasih.

*Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Padahal sudah dijelaskan ASN tidak boleh ikut berpolitik. Tetapi tidak berpolitik tetapi ikut nyumbang.

Selanjutnya Mbah Tarom, silakan.

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*  
Selamat siang,

Yang saya hormati Pak Ketua dan Bapak-Bapak, Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati,  
Pak Sekjen Kementerian Pertanian jajaran,  
Bapak/Ibu semuanya.

Langsung saja, saya akan menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama saya ingin menyorot tentang anggaran di Sekretariat Jenderal. Ini saya pikir terlalu gemuk. Karena apa? Karena saya melihat Kesekretariatan Jenderal itu tugasnya tidak lebih antara lain yaitu urusan administrasi, kemudian dukungan manajemen, kemudian juga koordinasi dan rapat-rapat, padahal kegiatan-kegiatan itu setiap Dirjen sudah ada postnya. Artinya kegiatan Kesekretariatan ini sudah terback-up oleh kegiatan-kegiatan yang hampir sama dari Dirjen dan Sekretariat ini.

Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan, terkait dengan pupuk. Tadi disampaikan oleh Ketua saya ingin mendukung fakta lapangannya saja. Di waktu teman-teman petani ini baru sedikit keluar dari hiruk pikuknya kekurangan pupuk maka kemarin geger juga di Daerah tentang harus diberlakukannya kartu tani untuk menebus per 1 September dengan dasar surat Direktur Pupuk dan Pestisida, Dirjen PSP, kemudian ditambahi tindak lanjut dari surat Direktur itu Kepala Dinas Provinsi juga menekankan, kemudian dari Presiden penjualan dari juga seperti itu menekan kepada para petani 1 September harus menebus pupuk dengan menggunakan kartu tani. Tapi sebenarnya faktanya yang ada di sekitar

wilayah kami di Madiun, itu mestinya ERDKK ini ada 72.300 sekian ini yang tercetak baru 155. Kemudian yang di Magetan juga seperti itu, dari 98.000 sekian ini sudah lumayan baguslah yang tercetak 3400 sekian. Kemudian di Ngawi, ini 114.000 sekian yang tercetak baru 1093. Ini kalau dipaksakan untuk dilaksanakan penebusan pupuk menggunakan kartu tani ya nanti kira-kira petani bisa kegegeran dengan kita. Ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh Pak Dirjen PSP, jangan sampai gejolak di lapis bawah ini menjadi Presiden buruk.

Kemudian saya ke Pak Tanaman Pangan. Ini program umbi-umbian tolong terkait dengan porang Pak. Ini anggaran ditambahlah. Karena ini tanaman yang simple dan prospeknya luar biasa, dan ini pasarnya jelas meskipun ekspor. Jadi bisa dimakan, bisa untuk kecantikan, kemudian bisa untuk pampers. Jadi pampers ini tipis begitu saja semalam tidak pernah, ini luar biasa dan glukomonan yang inti bisa dijadikan uranium. Artinya ini luar biasa, maka saat ini saya harapkan ada sentuhan teknologi karena ini nanti begitu ini menjadi booming, masyarakat yang memproduksinya akan berhadapan dengan korporasi. Tentu akan menjadi kalahlah masyarakat, makanya bagaimana ini diberikan bantuan peralatan untuk meningkatkan tambah, kemudian juga fasilitas-fasilitas lain. Dan khususnya sertifikasi benih. Di wilayah kami ini sudah luar biasa.

Jadi setiap panen raya porang, ini masyarakat minimal beli truk Pak. Mohon maaf. Sekarang yang gelondongan yang 1 itu per kilonya sekitar 14 sampai 15 yang gelondongan. Kemudian yang cooper, yang digit dengan kering matahari itu sekitar 64.000, belum yang model oven, belum yang model tepung, ini yang luar biasa benar.

**KETUA RAPAT:**

Cukup mbah?

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

Cukup Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Nanti kita buat saja pabriknya. Kita join berdua.

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Jadi saya minta nanti dijawab dengan tegas, entah Dirjen PSP atau Direktur Pupuk hal yang ditanyakan tadi kartu tani bagaimana? Mau dicabut dengan ditunda atau bagaimana? Jawabannya nanti saja. Kita break ISHOMA, pukul 13.30 kita kembali kesini. Saya skors.

**(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 13.00 WIB)**

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 13.30 WIB)**

**(REKAMAN TERPUTUS)**

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Bagaimana persiapan kita menghadapi masa tanam terutama musim hujan ini. Saya tanyakan ini karena sebagian besar wilayah Dapil saya itu adalah tadah hujan karenanya kalau gagal panen kami di musim hujan ini Pak maka itu berarti kita gagal dalam setahun. Bagaimana pupuknya, bagaimana benihnya, Bagaimana alat-alat yang lain ketersediaan kita, karena saya tanyakan ini banyak sudah diskusi, banyak sudah berita segala macam tentang kelangkaan pupuk ini. Belum lagi banyak persoalan-persoalan tadi yang diangkat oleh teman-teman. Bagaimana tentang penebusan pupuk menggunakan Kartu Tani atau tidak. Nah ini kalau tidak beres dalam persoalan sampai bulan 10 ini Pak berarti kita sudah sama dengan merancang kegagalan panen. Demikian juga pak Deden tanaman pangan karena biasa di tempat saya itu, kalau tanam jagung nya sudah di atas bulan 12 itu sudah tanahnya sudah dingin katanya. Karenanya persiapan bibit, pupuk sebelumnya itu sudah sudah harus siap. Karenanya Saya minta penjelasan nanti bagaimana tentang kesiapan kita memasuki masa tanam terutama pada daerah-daerah tadah hujan.

Yang berikutnya soal anggaran terutama di Dirjen PSP. Ini saya lihat kemungkinan *double* anggaran ini, mungkin bisa nanti kita juga dijelaskan. Di sini sudah ada jaringan irigasi tersier 221.650, ada irigasi perpompaan, ada irigasi perpipaan. Ini coba nanti kita dijelaskan. Kalau misalnya tumpang tindih Pak ketua ya kita pilih salah satunya saja, judulnya atau apanya nanti coba di.

Yang berikutnya soal *Food Estate* ini Pak Ketua. Saya sejak awal rencana food estate ini sudah saya tolak Pak Ketua. Ini tidak benar. Ini kita Komisi IV, judul kita ini adalah ketahanan pangan, tetapi semua mitra kita menggunakan nomenklatur mendukung. Saya khawatir *Food Estate* kayak hantu begitu, enggak jelas. Mendukung anggaran *Food Estate* 2,2 triliun, bentuk utuhnya kayak apa? Kita kan belum pernah dijelaskan sampai sekarang Pak Ketua. Di mana barang utuhnya ini kok kita mendukung. Kok komisi ketahanan pangan itu mendukung tentang lumbung pangan, harusnya kan rumahnya di sini Pak Ketua. Karenanya nomenklatur mendukung itu saya tidak setuju. Kementerian Pertanian harus bisa menjelaskan ini, gimana sih utuhnya tentang ketahanan pangan itu. Kita buka di Dirjen PSP mendukung food estate, kita buka di tanaman pangan mendukung *Food Estate*, PKH

mendukung *Food Estate*, semua mendukung. Apa yang kita dukung? Anggaran dukungannya saja 2,2 triliun, anggaran utuhnya berapa? Bagaimana bentuknya? Saya mengingatkan saja Pak Menteri, jangan kita terjebak dan jangan jebak kami untuk melanggar undang-undang karena stakeholder tentang pangan pelaksana Undang-Undang. Karena stakeholder tentang pangan pelaksana Undang-Undang itu adalah Kementerian Pertanian, bukan pertanian lain. Jangan hanya karena namanya sama soal ketahanan nasional dan ketahanan pangan, kemudian disatukan dalam sebuah mengkerangkeng kita dalam sebuah istilah ketahanan itu tidak. Sejak awal Saya sudah bilang bahwa ini respon kita terlambat. Kenapa membuat *Food Estate* waktu itu alasannya adalah untuk merespon warning WHO. Warning WHO itu sudah ada sebelum Covid, dan sudah sejak lama juga sudah kita ingatkan. Karenanya Pak Ketua, saya mengusulkan melalui Pimpinan agar mungkin ini bisa menjadi sikap dari Komisi IV itu bahwa kita Komisi IV itu tidak akan mendukung kegiatan *Food Estate* sebelum pihak yang bertanggung jawab tentang *Food Estate* secara utuh itu, itu memberikan penjelasan kepada kita. Mau Presidenkah dia, mau Menkokah dia, hadirkan di Komisi IV berikan penjelasan kepada kita, karena semua Menteri mitra Komisi IV itu nomenklaturinya adalah yang mendukung. Pertanyaan utamanya adalah apa yang kita dukung. Nah karenanya usul saya hal-hal yang berkaitan dengan tentang *Food Estate* ini kita hilangkan saya dulu, kita menggunakan pisau paling tajam untuk kita potong anggaran-anggaran tentang *Food Estate* ini karena adalah barang tidak jelas.

Berikutnya soal, belum lagi kalau misalnya kita masuk ke detail Pak, misalnya ekstensifikasi lahan dan segala macam itu, dasarnya harga berapa, dirancangan kegiatan yang halaman 5 dan 6 kemudian dibandingkan juga dengan halaman 7 itu harga satuannya udah berbeda. Dalam PSP tadi ada anggarannya per hektar itu 6 juta lebih lebih, 6 juta sekian. Tetapi dialokasi anggaran dibidang Nomor 7 tentang anggaran ABT ini anggaran per hektarnya 5 juta. Jadi satuannya sudah berbeda. Karenanya perlu nanti dirapihkan.

Berikutnya soal pupuk. Ini terjadi kelangkaan dia dimana-mana Pak Dirjen PSP. Tolong berikan kami kepastian, berikan penjelasan, bukan hanya penjelasan tertulis di forum ini karena ini juga disaksikan di semua medsos DPR ini disiarkan pertemuan. Berikan penjelasan kepada para petani di Indonesia bahwa persoalan pupuk itu mereka bisa mendapatkan ketika mereka membutuhkan sesuai dengan prinsip pupuk itu 6T itu (Tepat waktu, tepat jumlah, tepat segala macam itu) yang 6 itu yang sering kita sebut. Tolong berikan penjelasan kepada hal itu.

Nahitu mungkin Pak Ketua hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penjelasan atau gambaran yang utuh sehingga anggaran 2021 sesuai dengan target Menteri itu angka kesejahteraan petani itu meningkat bisa diwujudkan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan sebelum dilanjut.

Saya mohon maaf sebetulnya kepada rekan-rekan sebelum melanjutkan pertanyaan. Saya dari tadi banyak mengamati Pimpinan, sebelum break juga saya dari ruang transit. Ini masalah kartu tani, berkenan Bapak-Bapak, mohon izin Pimpinan. Mungkin diberikan penjelasan atau jawaban terlebih dahulu baru kita, biar sinkron dulu.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak/Ibu Anggota yang saya hormati,

Kaitan dengan kartu Tani yang pertama kami sampaikan bahwa, kami adalah menindaklanjuti hasil temuan BPK, kemudian merespon surat edaran KPK, sehingga kami berkirim surat Direktur Pupuk dan Pestisida itu sudah kami ralat sebetulnya. Sudah kami ralat per 7 September, dan kami sudah melakukan rapat dengan ketiga Pimpinan Bank baik BRI, BNI 46, maupun Bank Mandiri beserta Pupuk Indonesia. Nah disepakati bahwa sesuai isi surat tersebut, para petani yang sudah memiliki kartu tani tetap jalan. dan para petani yang belum memiliki kartu tani bisa dilakukan penembusan secara manual, kira-kira itu. Dan itu sudah disebar ke oleh Pupuk Indonesia ke seluruh distributor dan kios pengecer.

Barangkali begitu.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Ijin Pimpinan, boleh dilanjut sebentar sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Saya terima kasih Pak Dirjen PSP. Secara tidak langsung Bapak menyampaikan sebuah kejujuran di forum ini Pak, bahwa surat yang kemarin saya minta ini adalah surat edaran terkait rekomendasi. Ini penting. Bapak jujur di sini, Bapak-Bapak jujur di sini, Pak Irjen mungkin juga. Penting Bapak pahami apabila dibaca ini, ini kan ada anomali data, data ganda yang mewajibkan akhirnya kartu tani. Betul Pak ya? Berarti kan ada temuan ya Pak ya. Nah terima kasih atas kejujurannya. Paling tidak di forum ini terbuka, supaya tidak dari tadi dari awal sampai sekarang permasalahannya kartu tani Pimpinan. Jadi kita fokus bahasanya apa. Jadi kita satu (suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Jadi bukan penghargaan, bukan?

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Ya kalau ternyata jadi penghargaan ya saya tidak tahu ya Pak. Tapi dalam tafsir saya membaca surat ini, ini ada temuan Pak. Itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Sedikit Pak Ketua menyampaikan, jadi memang ada temuan bahwa ada lebih kurang 92.000 itu double NIK, dan ada petani-petani yang sudah meninggal masuk ke e-RDCK. Kemudian kami langsung validasi dan verifikasi. Kita buang yang 92000 itu, dan sekarang posisi e-RDCK sekarang itu posisi hasil verifikasi dan validasi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan KPK. Oleh karena itu kemarin memang Pak Menteri mendapatkan penghargaan karena cepat merespon kira-kira begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bukan cepat merepon karena ada temuan. Jadi yang 92.000 itu mati semua orangnya? Oh kirain 92000 mati semua, yaitu karena ada temuan. Karena apa? Mohon maaf ini, di lapangan pun rata-rata *copy-paste*, Bapak juga sama *copy-paste*. Ini *copy-paste*, *copy-paste*, *copy-paste*. Wajar.

Selanjutnya Pak.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

Mungkin, saya nggak tahu di sini hadir Direktur Pupuk ya. Nanti tolong diberikan kesempatan juga. Kita ingin penjelasan supaya clear, sebab teman-

teman ini frekuensinya sama Pak. Jadi kita kan di sini mau bantu ya. Ya kan Pak momon ya? Jadi kita mau membantu bekerjasama. Nanti saya minta Pimpinan apabila tidak berkeberatan terkait kartu tani dan peredaran pupuk, saya mohon penjelasan dari Direktur Pupuk.

Terima kasih Pimpinan

**KETUA RAPAT:**

Ya nanti waktu jawaban sekalian. Selanjutnya Pak Haerudin.

Silakan.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pak Ketua, Pimpinan yang saya hormati,  
Pak Sekjen beserta Eselon I yang hadir dari Kementerian Pertanian yang saya hormati,  
Teman sejawat di Komisi IV yang saya cintai.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama untuk PSP, sama masalah kartu tani. Kartu tani ini problemnya bukan hanya didata seperti yang tadi akhirnya memang terevaluasi, ada double ganda tapi juga problem dilapangan dari sisi teknis.

Yang kedua ada juga problem dimana kitasudah disinyalir bahwa kios-kios itu dalam arti mereka beli barang bukan barang yang seharusnya. Nah sekarang itu sedang beredar pupuk-pupuk yang illegal itu yang 2500=1 kilo. Karena uang yang jadi diambilnya, jadi problemnya disitu sekarang. Makanya seluruh distributor pupuk yang dari pupuk subsidi semua menjerit urusan kartu tani. Ini problem yang kedua kita sekarang. Jadi kita itu memang dari awal tidak dievaluasi apa resiko yang akan dihadapi oleh para petani dengan kartu tani itu selain problem teknis, problem data plus problem dilapangan yang akhirnya jadi *complicated*. Bukan hanya lagi urusan signal internet. Ini problem di kita sekarang dari sisi data. Kita itu sampai hari ini belum punya data pasti, berapa e-RDCK kita yang sebetulnya karena banyak petani yang tidak masuk e-RDCK. Itu problem juga malah. Apalagi sekarang diperluas penerimaan pupuk subsidi itu diluar yaitu salah satunya perhutanan sosial yang bisa diakses pupuk itu. Jadi ini makin rumit posisi dengan cara kartu tani, tidak sederhana. Karena butuh di petani modern dan petani terdidik, butuh ruang yang disebut kartu tani itu. Yang ini kondisinya lama, perlu proses pendidikan para petani kita itu. Ini problem yang ada di kita masalah kartu tani. Saya sih rekomendasinya setuju bahwa kartu tani itu untuk sementara dihentikan saja. Kecuali petani-petani perkotaan boleh.

**KETUA RAPAT:**

Bukan dihentikan Pak Haerudin. Tapi ditunda sampai semua sistemnya berjalan dengan baik, dan semua pihak bisa menerima dengan baik juga bahwa kebutuhannya terpenuhi.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Terima kasih.

Pengartikulasian yang sangat bijak dari Pak Ketua Komisi.

Yang kedua masalah alokasi pupuk Pak Dirjen, ini problem di kita ini. Karena duitnya kurang makanya kata Dirut PI sekarang itu yang langka duit bukan pupuk karena kita belum dibayar-bayar sampai sekarang, kira-kira begitulah. Jadi kita susah. Kata Pak Dirjen yang langka juga duit karena kita belum dikasih oleh Kemenkeu. Jadi pacuit-cuit lutung kata orang sunda itu. Jadi melingkar ini pola kusutnya kita itu. Dan hari ini kita dengar para petani menjerit karena kondisi persoalan pupuk kita sudah saksikan.

Jadi musim tanam dengan cuaca yang tidak menentu, pupuk dibutuhkan, pupuknya tidak ada sudah kita dan sedang kita saksikan. Akhirnya mereka pilihannya cari pupuk-pupuk illegal yang datang atau impor yang murah-murah itu yang pertanian itu kita menentukan hasil yang baik malah merugikan petani itu sendiri. Jadi sudah asal-asalan karena kondisi seperti sekarang. Nah ini respon kita terhadap kunjungan Dapil kita kepada para petani kita tentang kelangkaannya pupuk kita sekarang. Kita kan susah kalau kita tekan kujurangnya, kita tekan petronya agar pupuk hadir kalau kata mereka kalau tidak ada duitnya nyatanya bagaimana problem. Karena problem keuangan kita makanya butuh.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Haerudin?

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Ada masalah hortikultura. Kita minta jahe diperluas Pak. Jadi keberpihakan urusan Covid masalah jahe.

Tanaman Pangan Pak Suwandi, kita memang minta apa yang sudah diberikan ke rekan-rekan kira-kira mitra kita yang disemangat rapat kita itu., bagaimana Sang Hyang Seri berdikari Pertani dibuat kerjasama. Kita belum pernah dengar skemanya seperti apa untuk kita dengar.

Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini ada pengadaan sapi yang nanti untuk 2021 yang nilainya 145 Miliar tentunya, dengan domba yang 7 Miliar. Secara pribadi mengajukan bagaimana ini anggaran sapi potong ini kita bagi 2 dengan pengadaan domba yang diperbesar. Jadi lebih efektif urusan persebaran domba karena jangka waktunya pendek. Jadi kalau istilah saya

dengan masyarakat itu kalau kita butuh makan kita urus ayam, kalau anak bisa sekolah SD urus domba, SMP itu bisa urus domba. Kalau kita punya anak sudah mau sekolah SMA, kuliah urus sapi.

**KETUA RAPAT:**

Cukup?

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Itu Ketua.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Hermanto, singkat, padat, jelas.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E, M.M.):**

Baik Pak Ketua.

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota, serta Eselon I Kementerian Pertanian.

Pertama, sebagian soal pupuk sudah disinggung oleh teman-teman. Ini berkaitan dengan soal kartu tani. Saya prinsipnya. Sebenarnya saya punya prinsip ini, kita pakai saja sih yang e-RDKK yang sekarang sudah rill, sudah pasti. Kalau kartu tani ini saya khawatir nanti ada terjadi diskriminatif dalam hal pendataannya.

Nah ini yang kita khawatirkan. Sekarang ini petani ini memang sudah menjerit dan bahkan sudah menangis untuk berharap pupuk ini harus ada, tapi sampai sekarang ya Alhamdulillah kata Pak Sudin ini tidak kunjung datang juga pupuk ini. Jadi saya khawatir nanti target-target pangan nasional kita ini bisa tidak tercapai. Saya minta supaya pupuk ini segera saja bisa diselesaikan. Tentunya ini soal pupuk ini kan, Komisi kan sudah membuat rekomendasi untuk supaya Pemerintah melunasi hutangnya dari hutang Tahun 2017, 2018, 2019 dan terakhir penjelasan dari pupuk kemarin itu hutang pupuk itu adalah sebesar 14 Triliun. Yang itu yang sudah 3 tahun didata Pak yang sudah dicantumkan. Tapi waktu statement waktu rapat terakhir disini Beliau menyebutkan sekitar 14.

**KETUA RAPAT:**

Yang sudah selesai di audit 11 koma sekian. Yang belum diaudit termasuk oleh BPK.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E, M.M.):**

Oke. Jadi itulah bahasanya. Jadi ini memang harus ada dorongan kuat karena saya pikir juga itu holding itu tidak mungkin juga melakukan produksi kalau tidak ada duitnya. Nah saya pikir ini nanti pihak Kementerian pun juga ini harus Kementerian Keuangan supaya hutang itu segera dibayar. Saya juga di Banggar sudah bicarakan ini, dan supaya Pemerintah membayar itu. Sudah 3 tahun kita nagih ini. Kita tagih ini. Ini Pak Haerudin nih sama pupuk.

Yang kedua saya berkaitan dengan soal Alsintan tadi, yang bahwa Alsintan sudah, sudah banyak di masyarakat. Saya memang perlu ada semacam yang sudah disebutkan oleh Pak Gatot tadi ada semacam mobile servicenya berjalan, atau misalnya ada satu bengkel disetiap 1 Provinsi. Ini sangat mendukung sekali untuk mengatasi kesulitan-kesulitan petani yang menerima Alsintan ini. Saya khawatir nanti itu kalau kita salurkan alatnya tidak terpakai karena lantaran rusak itu.

Kemudian juga yang ketiga saya mengkaitkan dengan persoalan bantuan-bantuan ternak ini. Jangan sampai hanya peternak ini hanya sebagai tenaga kerja. Kita salurkan, dia besarkan, kemudian dia tidak mengambil manfaat dari ternak ini. Dia sudah buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Itu pun juga kita harus batu dari sisi bagaimana petani ini, peternak ini bisa mengambil benefit juga dari hal-hal yang kita bantu ini.

Kemudian terakhir Pak Ketua, terkait dengan soal food estate di Kalimantan Tengah. Saya minta supaya kalau agak lebih pasnya ya itu leading sektornya itu ada di Kementerian Pertanian. Sebab yang mengetahui persis tentang seluk beluk, strategi dan skenario daripada pelaksanaan *Food Estate* ini atau lumbung pangan ini ada di Kementerian Pertanian. Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Johan tadi, kita bukan hanya sebagai *supporting system*. Tapi dia adalah sebagai leader. Karena disitulah peran dari Kementerian Pertanian untuk pengadaan pangan. Pengadaannya, ketahanannya dan juga kedaulatannya ada disana. Jadi saya khawatir nanti kalau dilimpahkan kepada K/L yang lain saya khawatir K/L yang lain juga tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Hanya sekedar buka lahan tapi tidak ada wujud apanya.

Demikian Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Pak T.A. Khalid.

**F-GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pak Ketua, beserta Komisi IV, para Dirjen, Pak Sekjen yang saya muliakan.

Pertama, saya ingin juga seperti tadi telah disinggung oleh Mbak Kiki. Saya berterima kasih. Hari ini ada pengakuan kejujuran, karena begitu kami dapat surat itu kami bicara sama Mbak Kiki ini begitu kami baca ini ada sesuatu kita Mbak Kiki. Kalau tidak, gak mungkin keluar surat dan terjawab tadi ada data yang anomaly sekitar 92.000 sekian. Alasan orang mati dan sebagainya. Ini menyangkut bicara komposisi. Ditambah lagi belum lagi permasalahan baru akibat kemarin kita keluarkan tanpa itu. Jadi terus bermasalah. Ditambah lagi pupuk subsidi tidak cukup kita, tidak sesuai dengan RDKK. Ini permasalahan ke-9. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyarankan, karena permasalahan data yang paling rumit di negeri kita ini permasalahan validnya data. Kalau kemarin bermasalah 92 sebagaimana penjelasan Pak Dirjen PSP tadi akibat masuknya orang meninggal. Nanti orang nama yang sudah masuk ini Pak, pasti juga akan meninggal nanti, siapa yang akan keluarkan sehingga akan double juga. Maka saya pada kesempatan ini ijin saya menyarankan coba berpikir kedepan karena negeri ini bukan hanya untuk periode kedepan tapi ada periode-periode berikutnya yang harus kita selesaikan. Alangkah baiknya saran saya, bisa tidak subsidi pupuk ini kita ubah skemanya menjadi subsidi pasca panen. Ini saran.

Mohon pengkajian kita bersama ini. Kalau tidak terus kita bermasalah dengan data. Belum lagi indikasi, ini yang saya dengar di lapangan mohon maaf, bahwa kualitas pupuk bersubsidi itu berbeda dengan pupuk.

**KETUA RAPAT:**

Pak Khalid, tahu berbeda pernah nyobain?

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Jadi indikasi ini juga kita bayar harga pupuk ke perusahaan, tapi kualitas pupuknya berbeda. Ini kan kasihan masyarakat. Maka saya menyarankan, kita ubah daripada subsidi pupuk, kita subsidi harga. Mungkin kalau harga di negeri ini bisa kita kontrol dengan baik masyarakat lebih semangat. Karena faktanya kemarin waktu Pak Menteri datang ke Aceh harga jagung 4200, dan Pak Menteri menyampaikan di Bireun itu waktu dengan Pak Presiden saya dampingi menjamin harga jagung 4200, ada beberapa perusahaan kemarin datang bersama Beliau, ada Bapak. Kemudian Pak Sudin, saya sebagai anak buah Pak Sudin Komisi IV saya dorong masyarakat untuk tanam jagung. Hari ini 3000-an 2000 sekian.

**KETUA RAPAT:**

Jadi saran saya Pak Menterinya suruh tinggal di Aceh saja biar harganya bagus terus.

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Ini permasalahan. Sebenarnya bangsa Indonesia bukan bangsa pemalas, tetapi bangsa Indonesia dituntut menjadi pemalas karena harganya tidak stabil. Maka negara ini bisa kita tidak mampu mensubsidi kepada masyarakat mari kita pastikan mereka mendapatkan harga yang baik. Iya betul Pak. Kenapa di Aceh orang suka nanam ganja, harga ganja lebih pasti daripada harga jagung. Maka saya minta kepada Kementerian, khususnya menyangkut dengan permasalahan pupuk bersubsidi yang terus bermasalah baik kualitas, syarat ambil, maka saya menyarankan kedepan mari kita cari skema agar kita ubah. Tidak lagi subsidi pupuk, kita subsidi harga. Jadi negara ada kejaminan, ada pasti harga, mengontrol harga, dan kalau masyarakat bisa kita berikan harga yang patut dan layak Inshaa Allah masyarakat pasti akan lebih rajin.

Yang kedua, ini mohon maaf Pak, saya melihat di halaman 5. Ada layanan dukungan manajemen untuk 33 Provinsi dan 525 Kabupaten. Itu anggarannya hampir 200 Miliar. Kalau kita bagi rata-rata sekitar 354 juta per Kabupaten/Kota, ada Provinsi. Kemudian saya melihat juga ada di bingkai monitoring evaluasi di hampir setiap kegiatan. Contoh di kegiatan pengolahan air dan untuk pertanian itu ada sekitar 25 Miliar. Kalau kita bagi itu per, untuk 33 Provinsi itu sekitar 758 juta sekian. Begitu juga di kegiatan-kegiatan lain. Ini mohon sedikit saya penjelasan karena total anggaran monitoring saja di PSP ini hampir mencapai 300 Miliar. Ini mohon penjelasan. Mungkin benar. Kalau memang itu terlampaui besar mohon, apalagi kondisi Covid keuangan negara kita lagi menjerit, kita menjadi orang-orang yang harus *sense of crisis* terhadap kondisi itu.

**KETUA RAPAT:**

Cukup?

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Ada lagi Pak.

**KETUA RAPAT:**

Lanjutkan.

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Siap Ketua.

Kemudian ke Hortikultura. Kita luar biasa ini penyediaan bibit dan lain sebagainya. Tapi nampaknya anggaran ini anggaran bagi-bagi bibit saja kan. Karena kemarin jujur Pak Sudin, saya Anggota baru di Komisi ini mendapat anggaran 300 juta per Anggota untuk bagi-bagi bibit per kelompok sehingga saya tidak mau ambil. Kalau bibit saja masyarakat bagi bibit 200, bekas bibit bayam, dan lain sebagainya masyarakat tidak bisa kerjakan. Jadi saran saya,

hortikultura bukan Cuma Dirjen bagi-bagi bibit tetapi bagaimana kita bisa membina orang yang menghasilkan sesuatu.

Kemudian yang terakhir, menyangkut dengan sapi potong. Tadi telah disinggung oleh Kanda saya Pak Haerudin menyampaikan separuh-separuh saya malah tidak sepakat sapi potongnya itu. Ngapaian kita potong dulu, siapa ini. Kalau saya tidak sepakat sapi potong, tapi bagaimana kita berikan bibit sehingga masyarakat bisa kita bina. Kalau potong nampaknya ini mohon maaf, kayak kemarin acara-acara Kementerian yang datang ke Aceh yang diambil sapi-sapi potong begitu. Jadi bukan untuk masyarakat. Jadi saya berharap ini bisa dialihkan ke kambing saya sepakat karena itu lebih cepat.

Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan.

Yang terakhir saya sependapat dengan *Food Estate*. Kalau bisa kita juga dari Kementerian ini sebagai leading sektor utama, mari kita cari Provinsi-Provinsi yang bisa kita ciptakan sendiri *Food Estate*. Karena itu apa? Menjadi cikal bakal untuk pergerakan masyarakat.

Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

**KETUA RAPAT:**

Wa'allaikumsalam.

Selanjutnya Mbak Nur'aeni.

Silakan.

**F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*  
Selamat siang buat semua.

Pak Ketua yang saya hormati beserta teman-teman semua,  
Pak Sekjen beserta jajaran Eselon I.

Langsung saja mungkin dari saya. Tentu dalam evaluasi 2020 ini saya sepakat bahwa hal-hal yang memang tidak layak untuk dilakukan dan masih lambat ini juga untuk dievaluasi kegiatan 2021. Kegiatan tersebut tidak diulang kembali dalam hal perencanaan. Dan saya lihat disini bahwa masyarakat kita khususnya petani ditengah-tengah pandemi Covid, esrta pemulihan ekonomi nasional. Saya mendorong bagaimana Kementerian Pertanian ini untuk lebih fokus mengarahkan kepada program pemberian insentif serta dorongan untuk bagaimana petani-petani kita itu diberikan subsidi-subsidi yang digerakan oleh Kementerian Pertanian.

Sepakat tadi yang disampaikan beberapa hal yang diharapkan oleh para petani, seperti masih langkanya pupuk bersubsidi dan tentu mengapresiasi tadi yang disampaikan oleh Bu Kiki bagaimana kira-kira kartu tani ini kedepannya sehingga petani kita juga bisa mengakses serta bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan tidak dibuat rumit bahkan berbelit-belit. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, bahwa disamping pupuk seperti jalan usaha tani, serta jaringan tertier, sekunder ini juga masih dibutuhkan di Dapil. Tapi saya lihat programnya sudah ada ya. Tentu ini sangat mendukung sekali beberapa program yang memang realistis, terukur dan tepat sasaran. Inshaa Allah ini didukung agar tetap dilanjutkan.

Adapun hal yang lain seperti food estate, apa yang disampaikan Pak Johan saya sepakat. Kalau sekiranya program tersebut tidak realistis dan tidak terukur karena tadi disampaikan Ketua, apakah mungkin dari 123 hektar yang dicanangkan dan direncanakan ini akan bisa dilaksanakan selama 1 tahun serta melihat dari kontur tanah. Nah saya lebih setuju bahwa kegiatan atau program *Food Estate* ini juga untuk dievaluasi agar lebih menyakinkan kepada kita khususnya Komisi IV agenda besarnya seperti apa. Rencana yang akan dilakukan itu bagaimana dan hasil yang akan didapatkan dari *Food Estate* itu seperti apa. Kalau pun ada mungkin alternative yang lain bisa saja, kenapa tidak digerakan untuk bisa setiap daerah yang memiliki lahan-lahan tidur yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan Perhutani ataupun yang lainnya sehingga dioptimalkan lahan tersebut. Toh sama saja kalau hasilnya memang untuk meningkatkan ketahanan pangan kita.

Nah yang lain Dirjen Tanaman Pangan. Ada jenis tanaman yang memang pengembangan realisasinya belum terealisasi secara signifikan. 26%nya itu sereal. Nah ini apa kendalanya sebetulnya. Kalau pun memang ini tidak teralisasi, kenapa tidak sih difokuskan saja kepada jenis tanaman yang memang menjadi bahan pokok kita seperti padi, jagung dan lain sebagainya. Akan tetapi disini seperti bibit padi, dan jagung saja masih kenaikannya tidak signifikan. Kalau memang masyarakat kita memang jeni makanannya padi sebagai sumber pokok makanan kita, kenapa tidak lebih ditingkatkan kembali. Toh di masyarakat petani juga ini masih menjadi persoalan kaitan dengan bibit padi, jagung, ini juga di Dapil saya ini masih menjadi persoalan. Saya berharap bahwa subsidi yang langsung yang bisa menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang lain yang bisa memanfaatkan situasi saat sekarang ini. Maksud saya bahwa petani saat ini harus dirangkul, harus diberikan perhatian lebih dengan langsung diberikan bentuk subsidi yang sifatnya output harus dirasakan oleh petani itu sendiri. Mohon maaf, kalau yang saat ini dirasakan tadi, adanya pemberian bibit. Terbukti petaninya saja. Dia mau melakukan pembuatan penangkaran bibit padi, akan tetapi apa yang didapatkan, sudah mereka lakukan mati-matian ternyata yang dibeli atau pun yang langsung diberikan kepada petani adalah bibit-bibit padi dari luar. Optimalkan potensi-potensi local yang ada agar petani juga mampu digerakan dan menghasilkan nilai ekonomis.

Untuk hewan ternak, Dirjen Peternakan. Kalau melihat dari anggaran yang direncanakan ini cukup signifikan rencana 2021, akan tetapi dalam menhyusun kaitan dengan SSH mohon kiranya untuk dievaluasi secara cermat karena saya melihat ada beberapa contoh seperti hewan unggas yang memang anggaran direncanakannya cukup besar sekali dengan belanja kurang lebih 500.000 ekor. Kira-kira kalau ditotalkan 1 ekornya 126.000, jenis unggas seperti apa sih, terus arahnya apa pengembangankah atau memang untuk dijual kembali. Kalau pun nanti pengembangan pasti si ternak ini kan menjual kepada pasar mungkin kan, kira-kira nih apakah masyarakat kita akan mampu membeli. Nah mohon ini untuk dievaluasi dari item-item. Kita dukung kalau arahnya memang peternakan yang menjadi prioritas tiap daerah tapi yang realistis untuk bisa menentukan harga satuan baik itu domba, kambing dan lain sebagainya serta itik khususnya karena menghitungnya itu karena jumlahnya banyak pasti kita juga akan ukur SSH satu per satu, jangan dikira kita tidak meghitung walaupun besar kita akan hitung satu per satu item-item SSH yang dibuat oleh.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Bu Pimpinan?

**F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Cukup saya kira.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Muslim.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua yang baik hati.

Terima kasih teman-teman Anggota Komisi IV, Pak Sekjen, beserta jajaran Kementerian Pertanian.

Saya tidak banyak Pak Ketua. Saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Yang pertama mungkin saya ingin mengingatkan kembali berkaitan dengan Dirjen Tanaman Pangan maupun Dirjen Sarana-Prasarana dan juga Dirjen Horti. Kita sepakat tadi dari awal memang apa yang disampaikan di beberapa RDP yang dulu berkaitan dengan Elsintan ini Pak Ketua ya. Saya sepakat. Artinya ini kan harus kita evaluasi, harus betul-betul kita rewind kembali. Disini juga ada Pak Irjen. Saya pikir kita punya semangat yang sama nih Pak Sekjen ya. Tentu yang disampaikan Pimpinan bahkan saya sampaikan juga di beberapa pertemuan yang lalu

bahwa bagaimana sekian ratus ribu Elsintan yang telah dibagikan ke seluruh Indonesia ini.

**KETUA RAPAT:**

Alsintan.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Mohon maaf, Alsintan.

**KETUA RAPAT:**

Bukan Elsinta, bukan.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Maaf, agak-agak salah sebut sedikit Pak Ketua. Alsintan yang telah dibagikan seluruh Indonesia ini kan out put, out come ini seperti apa Pak Sekjen. Artinya saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Ketua, kalau ini menjadi satu keputusan nanti di RDP hari ini bahwa semua penyedia Alsintan ini wajib untuk dalam rangka maintenancenya. Kalau tidak terus terang Pak Sekjen, Pak itu hampir disebagian Kabupaten itu semua mangkrak, mereka ditumpuk digudang-gudang. Akhirnya kan tidak optimal. Akhirnya apa yang kita berikan kepada masyarakat ini tidak bisa bermanfaat semaksimal mungkin.

Yang kedua tentu kualitas sampaikan lagi. Artinya kualitas yang diberikan kita harapkan betul-betul sesuai dengan daerahnya. Jangan sampai ketika, apakah traktor, hand traktor ataupun combain diberikan tidak bisa mereka pakai Pak Sekjen. Yang akhirnya tidak bermanfaat juga secara maksimum buat kepentingan masyarakat.

Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Pak Nasrullah nih Dirjen PKH. Tadi Bu Nur'aeni sudah sampaikan. Kalau saya lihat hari ini Pak Nasrullah, semangat masyarakat apalagi di era pandemi ini, ini spirit untuk menjadi peternak luar biasa Pak. Tentu ini kita berharap ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang di Pedesaan yang betul-betul tersentuh langsung oleh Kementerian. Saya berharap ini juga diimbangi dengan bantuan-bantuan itu Pak, misalnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah itu masalah produksi pakan ternak. Saya pikir ini masalah pakan ternak ini menjadi problem Pak Nasrullah ya. Kita lihat di daerah-daerah tertentu kita back-up sehingga kita bikin juga pendampingan kepada masyarakat, mereka juga bisa memproduksi pakan ternak sendiri. Jadi sehingga persoalan pakan ternak ini juga sangat penting Pak Nasrullah. Itu menjadi sorotan.

Kemudian yang kedua Pak Nasrullah, berkaitan rencana lokasi kegiatan utama, itu Tahun 2021. Saya melihat ini Aceh Pak. Aceh disini saya melihat ini. Kita ada 3 Pak Dapil Aceh disini, ada saya, ada Pak T.A. Khalid, dan juga ada Pak Salim Fakhri. Ini saya lihat pengembangan ayam local. Ini

sebetulnya sangat efektif Pak, ketika pengembangan ayam local diberikan tapi yang dilokasikan disini kan hanya 6500 ekor Pak. Saya pikir ini sangat miris sekali. Saya berharap ini, tolong dialokasikan yang tepat Pak. Ini kan sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Paling tidak dikasihlah 12.000, atau 20.000 Pak. Kita lihat di tempat lain ada yang 35.000. Artinya ini tolong dilihat secara maksimum Pak Sekjen. Ini menjadi perhatian. Jadi sehingga. Karena sangat bermanfaat Pak, ketika ayam local ini kita dorong itu masyarakat merasakan betul manfaatnya daripada peternakan itu sendiri.

Terakhir Pak Dirjen Horti. Saya sudah kirim surat waktu itu Pak dari Kabupaten Aceh Utara itu. Itu masyarakat minta penambahan Pak, khususnya bawang merah dan bawang putih bibitnya. Ini tentu kita harapkan di 2021 ini bisa direalisasikan.

Itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Ibu Kiki.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Pak Sekjen, beserta Dirjen-Dirjen yang hadir.

Jujur saya agak kurang-kurang semangat sebenarnya Pimpinan. Saya diajari senior saya Pak Mindo tuh baca bahan, Cuma setelah mungkin teman-teman tidak sadar antara yang dibaca sama yang dipaparkan di beberapa Dirjen itu berbeda makanya saya jadi gunanya Pak dibaca.

**KETUA RAPAT:**

Stop dulu. Suruh yang bersangkutan menjelaskan dulu. Kalau tidak kita stop.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Karena saya bingung Pak, data mana yang mau dipakai? Apakah yang dipaparkan di layar atau yang ini? Ini saya pelajari sendiri Pak, saya tidak suruh TA saya baca loh saya baca sendiri. Jadi tidak ada gunanya gitu loh. Ini jujur saja saya capek jadinya. Mungkin tidak tahu teman-teman sadar atau tidak. Maka dari tadi saya lihat, makanya saya dari tadi (suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Coba diberikan salah satu contoh mana bahan, mana yang ditayangkan.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Ya dari tadi saya coba tanya ke sebelah kiri saya, Pak Suhardi Duka, ke belakang. Karantina, kalau ada perubahan itu.

**KETUA RAPAT:**

Coba tayangkan dulu Karantina. Tolong Karantina ditayangkan, hal yang mana?

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Unit laboratorium saja yang kelihatan jelas karena Cuma 1 sendirian. Di bahan awal itu 150, benar tidak Suhardi? Yang muncul 200 tadi. Yang benar yang mana? Itu satu saja deh. Yang lain mending koreksi sendiri karena ada beberapa Dirjen saya lihat, saya minta *softcopy* lagi akhirnya beda memang. Ini jangan dianggap kita ini becanda teruslah, lelah juga rapat ini. Ya kasihan juga, kayak Pak Guntur, Pak Mindo yang sudah ini kita diruangan kayak begini.

**KETUA RAPAT:**

Sudah tua maksudnya, sudah tua.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Bukan. Maksudnya yang muda saja lelah Pak, apalagi yang sudah senior Pak. Kan begitu. Iya kan. Nah yang mana yang benar ini Pak Momon? Masa gini terus setiap rapat. Sebelum saya lanjutin itu, coba yang mana yang benar yang mau dipakai. Itu dulu.

**KETUA RAPAT:**

Selain itu yang mana lagi biar sekalian. Sekalian dijawab. Ada lagi? Supaya clear masalahnya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

TP ada, sedikit ya Pak Wandu ya perubahan mungkin. Ya oke. Karantina benar Pak Ali Jamil? Ya.

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Ijin Pak Ketua, mungkin ada perubahan Pak, Bu, mungkin itu yang kelupaan Pak Sekjennya ya barangkali Pak ya. Ada perubahan kemarin itu

yang sudah juga dikomunikasikan. Mohon maaf ini kalau ada terkait dengan ini Pak.

**KETUA RAPAT:**

Dikomunikasikannya ke siapa?

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Mohon maaf Pak, ini saya tanya dulu Pak ya. Ini karena kemarin kan ada perubahan terkait dengan usulan ini karena contoh kemarin begini, setelah saya koreksi awal kemana alat ini ditujukan ada beberapa saya koreksi kemarin. Mungkin ini Pak, mohon maaf (suara tidak jelas).

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Interupsi Pimpinan.

Ini mohon maaf. Betul juga kata Mbak Kiki tadi, kadang-kadang kita tidak engh karena kita terlampau percaya.

**KETUA RAPAT:**

Kalau kita mitra kan harus saling percaya.

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Saling percaya. Jadi ini sebenarnya waktu kalau ada perubahan kayak tadi, ini mohon maaf disampaikan waktu paparan tadi. Tapi ini kan bagaikan kita tidak menghargai. Kan dari awal saya sudah sampaikan, kita tidak ada batas. Tujuan kita untuk baik, tapi kalau begini. Saran saya Pak, ini dibenarkan dulu ini. Kalau tidak ngapain kita lanjut-lanjut terus ini.

Terima kasih.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Ijin saran Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Saya pikir kalau seandainya seperti ini. Ini kan agenda negara dan ini dokumen negara, dan ini penting dipertanggungjawabkan. Mohon kiranya harus clear dan mungkin sebaiknya kita clearkan dulu karena ada beberapa penyesuaian juga yang kita belum dapat Pak. Saya juga melihat di Karantina ini ada selain yang tadi Mbak Kiki sampaikan.

Terima kasih.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Boleh balik saya yang nanya. Jadi begitu Pimpinan, dengan senior-senior saya mohon ijin. Bukan apa, karena beneran mata saya ini hampir sudah sakit Pak baca bahan, terus begitu melihat kesini kok beda gitu loh. Memang dipikir DPR ini tidak pernah baca bahan. Pak, saya hobby baca Pak, makanya. Pak Wandu pernah komentar ya, kok sampai unit sama kilometer Bu Kiki bisa tahu, ya kan? Pak Momon juga pernah bilang. Ya saya baca Pak. Terus ngapain ini ditumpuk doang, kan tidak ada kerjaan.

Nah jadi mohon ya buat saya, saya butuh jawaban yang mana yang mau dipakai? Kalau tidak lebih baik stop saja rapatnya Pak, tidak jelas ini. Kan begitu.

Nah kemudian, kan lagi jatah nanya ya. Atau mau distop dulu. Nantilah, nanya dulu deh. Ini saya kesampingkan bahan nih Pak. Saya tidak mau baca ini karena saya tidak tahu yang mana. Terkait kartu tani lagi, saya tadi googling tanggal 5 September 2020 76.000 petani di Kab. GOA menerima kartu tani, tanggal 2 bulan sembilan 2020 31.021 petani di Ponorogo terancam tidak dapat kartu tani. Tanggal 3 September 2020, kartu tani bermasalah, 14.000 kartu tani. Tanggal 27 Agustus, tidak memiliki kartu tani, 72.000 petani di Madiun (tempatnya Mbah Tarom) tidak mendapatkan kartu tani. Pertanyaan saya, yang saya bingung di Madiun 72.000 tidak dapat, sawahnya banyaklah ya masih Jawa saya rasa. 76.000 di Gowa. Apa karena Menteriya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya kampung halaman.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Oh gitu, biasanya begitu ya. Oh. Baru tahu. Saya ingin juga jadi Menteri biar Sumsel dapat. Jadi begini, ini kartu tani ini sekali lagi. Kita disini semua duduk karena doa dan dorongan masyarakat dan konstituen. Iya kan? Bapak-Bapak di eksekutif ayolah kerjasama. Kita ini mau memperbaiki walaupun sudah benang kusut gitu, tapi bukannya tidak bisa diperbaiki toh. Kan begitu. Nah terus kalau data yang kemarin ini cobalah saya tidak tahu yang bikin siapa? Ini double-double banyak sekali disini. Saya tidak tahu yang bikin siapa ya. Makanya saya sudah males sebenarnya. Cuma karena saya taat sama Pimpinan dan senior saya disini saya datang gitu loh.

Nah kemudian *Food Estate*, sepakat saya. Kita semua mendukung Pemerintah, tidak ada yang tidak dukung Pemerintah didalam ruangan ini apalagi sector pangan. Tapi leading tuh siapa? LHK rapat ada, KKP rapat ada, iya kan? Ini kita ini mau becanda atau serius membangun negara ini, gitu loh.

**KETUA RAPAT:**

Teguh mana Teguh? Teguh.

Tampilkan tadi.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Iya kan? Belum lagi saya tidak mau menyinggung. Ini kan terus kita coba komunikasi kan disini kita punya teman-teman juga Pak dari Komisi lain, apalagi Fraksi itu biasanya suka rapat. Nanya, ini sebenarnya di Komisi kalian ada tidak? Ada juga. Berarti ada berapa banyak total.

**KETUA RAPAT:**

Pemanfaatan kawasan XPLG di Kalimantan Tengah dalam mendukung ketahanan pangan. Luasannya 165.000 hektar, dananya 5 Triliun, itu dari Kementerian PUPR, Ini lihat.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Saya lagi ngomong Ketua, jangan dipotong (suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Tunggu dulu, saya jelaskan dulu.

Lihat, ini fakta ini. Saya tidak tahu ini PUPR barusan saya dapat dari Komisi V. Jujur, kalau siklus anggarannya masih lama saya batalin rapat hari ini.

Ya lanjutkan.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Saya lanjutin, Cuma jangan dipotong lagi ya Pimpinan. Buyar masalahnya.

Nah itu Bapak, itu mitra lainlah ya Pak. Saya tidak mau urusin Komisi lain deh. Iya tidak? Itu kan Komisi lain. Benar tidak Pimpinan? Iya kan. Jangan marah dong kan itu Komisi lain atau bukan, gitu maksudnya. PUPR Komisi berapa? Komisi V. Maklumlah anak baru saya.

Nah kalau saya tidak mau bicara yang lain tapi mitranya kita saja Pak. Kemarin saya bertanya hal yang sama. LHK ada prioritas nasional bahkan ada tulisannya pangan disitu. Ibu Menteri, koordinasinya sama Menteri teknis kayak gimana? Benar tidak Pak, iya kan? Nah kita semua ingin jalan Pak. Tapi kalau duit negara ditumpuk-tumpuk kasihan saya mah, jujur saja tidak mau lagi saya bayar pajak Pak kalau begini ceritanya. Saya bayar pajak. Pakde Guntur sampai senyum loh ya.

Nah jadi saya mohon kejelasan juga masalah. Pak Jokowi kami dukung keputusannya tapi tolong juga rasionallah, siapa yang menjadi leadernya disini. Kalau mau pangan, konsisten pangan. Sama seperti halnya saya bilang berkali-kali sama Pak Wandu, itu kedelai kalau memang kira-kira kagak dapat juga targetnya ya sudah fokus, jangan gagal fokus. Bapak silakan minum kalau gagal fokus biar padi, jagung saja. Kan begitu Pak. Saya bukannya tidak suka kedelai. Saya suka tempe. Tapi mbok ya rasional gitu loh kasih targetnya. Jangan sok-sok mau swasembada buntut-buntutnya impor lagi. Sama saja bohong.

Hortikultura itu juga. Bapak bikin pengembangan kawasan. Anggaran Bapak ada lagi, benih lagi. Memang waktu Bapak ngembangin kawasan tidak pakai benih, ngembangin doang? Kan begitu jadi pertanyaannya. Kenapa saya tahu Pak? Saya baca Pak, saking sayangnya saya sama Menteri Pertanian ini. Gitu loh. Ya itu dulu saja Pak. Saya minta keputusan Pimpinan. Bahan mana yang dipakai? Ijin.

Terima kasih.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Nanti kita putuskan setelah penanya selesai.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, interupsi boleh? Sebentar Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bapak kedua, setelah ini Bapak nanti.

Mbak Aline Mus, silakan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Baik.

Terima kasih Ketua.

Sebelumnya saya berterima kasih sekali atas pemaparannya. Tapi terus terang Ketua, saya pun juga membaca. Selain Mbak Kiki saya juga membaca bahannya, saya juga tadi mengkonfirmasi bahan apa sebenarnya yang kita pakai. Di Karantina itu Pak. Saya langsung saja karena mungkin tadi belum bisa melihat perbedaannya Cuma karena satu. Saya ada beberapa Pak Momon, yang terdapat jumlah dan juga tadinya. Yang tadinya ada di beberapa kegiatan terus dikurangi lagi kegiatannya, pagu anggarannya sehingga kita itu bingung. Focus penganggarannya masih tetap yang pertama atau tidak, gitu loh. Hilang ditelan karena ada beberapa kegiatan yang sudah

disampaikan. Itu coba tolong ditampilkan saja yang tadi Pak Dirjen paparkan dengan kita punya bahan. Karantina saja. Buka saja biar memastikan. Karena kita juga tidak perlu lanjutkan kalau seandainya kita belum tahu data mana yang kita pakai. Pak, di pengalokasian.

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Baik, buka Mas tolong Mas.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Karena kita dapat beda nih anggarannya.

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Iya. Yang di rencana program Bu ya?

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Iya. Kan kita sama-sama paham nih slide.

Di kelas 1, BKP kelas 1 Kupang disitu penguatan prasarana perkarantinaan yang kita dapat di bahan sini ya.

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Ijin Bu.

Mungkin begini Bu, kami boleh jelaskan Pak Ketua? Mungkin ini kan awalnya dulu kita masukan bahan tanggal 2 Pak ya. Jadi kita ada diskusi lagi terkait dengan perubahan ini sehingga ada perubahan. Tapi kalau tidak salah menurut tim kami itu sudah disampaikan Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau itu mungkin salah masuk.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Disampaikan ke siapa dulu?

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Penghubung, Pak (suara tidak jelas).

**KETUA RAPAT:**

Siapa-siapa, coba jangan asal tunjuk. Siapa? Diberikan kepada siapa revisinya?

Sekretariat ada tidak menerima revisi?

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Ya mungkin kemarin ya Bu ya?

Jadi mungkin begini Pak Ketua, kami jelaskan sedikit kenapa berubah ini. Ini kan awalnya anggaran kita 960-an sekian Pak. Terus usulan kami untuk alat peralatan itu ada kan ada sekitar 140. Nah terus kemudian ada masuk 50 lagi untuk yang KTT-KTT kemarin. Nah sehingga usulan itu masuk ke dalam yang anggaran kita yang Nah ini Pak. Jadi maksud disini usulan yang 40 lagi itu Pak yang untuk peralatan sehingga komposisi tentu berubah nanti alat yang diusulkan. Jadi akhirnya usulan peralatan diluar yang ini, ini hanya tinggal 100. Itulah yang kami masukan terakhir Pak Ketua. Jadi tadinya anggaran kita itu di Karantina itu 966. Jadi dikembalikan 50, itu menjadi 1016. Nah usulan peralatan yang 140-an itu dimasukkan kedalam anggaran kita yang 1016. Nah tinggal 100 lagi itulah anggaran yang kami usulkan untuk peralatan lab insenilator dan xray itu yang setelah ini.

Demikian penjelasan Pak Ketua.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Baik.

Terima kasih Pak Dirjen.

Ini kan saya hanya mau.

**KETUA RAPAT:**

Pak Kepala Badan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Pak Kepala Badan Karantina, sorry. Ini kan saya melihat, misalkan di alat laboratorium 150 wilker satuannya 150 unit sementara kita yang disini yang kita dapat ya. Terus yang dislide itu ada 200 unit, tapi yang dibutuhkan jumlahnya sama 26 Miliar 500 Juta terus ini kan total jumlahnya yang diusulkan sama tapi unitnya berbeda. Disini 150, yang di slide 200 tapi jumlahnya sama. Ini maksud saya yang uangnya sama.

**KETUA RAPAT:**

Uangnya sama. 150 dengan 200, uangnya sama.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Unitnya yang beda, tapi uangnya sama Pak.

Mohon maaf Pak, ini saya melihat ini.

**KETUA RAPAT:**

Nanti saja Pak jelasinnya.

Lanjutkan Mbak Alien.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Baik, itu di Karantina.

Terus kita juga melihat, saya juga melihat ada slide yang perbedaannya di BKP kelas 1 Kupang. Itu juga perbedaan juga Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jelaskan saja perbedaannya supaya jelas.

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Ijin Pak Ketua. Ijin Bu Alien Mus.

Oh nanti ya.

**KETUA RAPAT:**

Sampai Mbak Alien selesai, semua selesai baru dijawab. Yang ngatur persidangan saya.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Inia da 5 volume, ada 5000, terus satuannya meter square ya. Benarkan Pak? Yang kita punya. Terus disini saya melihat, coba dimasukin di penguatan sarana operasional yang ada. Alokasi anggaran penguatan sarana operasional per karantina, halaman 14. Kalau kita yang punya Pak Suhardi, ini kita punya di halaman 19. Di halaman 19 yang materi. Yang di slidenya halaman 14. BKP kelas 1 Kupang. Ini satuannya disini unit, satuannya meter square, terus yang diusulkan itu jumlahnya 30 Miliar pembangunan gedung. Ini pencegahan ASF pemusnahan. Jadi penguatan prasarana perkarantina alokasi anggaran. Yang disini penguatan anggaran. Penguatan sarana operasional perkarantina. Jadi maksudnya yang mau difokuskan yang mana? Yang disini misalnya pembangunan gedung, dalam dan renovasi gedung. Disini masuknya wilayah perbatasan. Ini untuk Karantina.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi?

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Sudah.

**KETUA RAPAT:**

Sudah. Oke.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Ada untuk Hortikultura Pak. Hortikultura saya ingin mempertanyakan Pak, masuk saja kalau disini di slide kita tidak ada halaman tapi disitu saya lihat ada rancangan anggaran Dirjen Hortikultura Tahun 2021. Ini kalau di kita tidak ada halamannya disini. Kita melihat ada peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, terus kita juga melihat kegiatan-kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura, area pengendalian organisme, pengganggu tanaman sekira 28.240 hektar. Anggarannya 117 Miliar 872.500. Terus kita juga melihat ada di kawasan kelengkeng, ada 1530 hektar, ada 15 Miliar. Pertanyaannya juga sama Pak, ini kelengkeng juga termasuk salah satu buah yang diimportkan, tiap tahun kita import. 1530 hektar ini apabila melakukan peningkatan apa tetap kita harus import atau tidak? Nanti Bapak jawab.

Terus disini kita juga melihat ada pengembangan sistem perbenihan hortikultura dibenih umbi, atau rimpang hortikultura. Ada 7258 ton, atau 268 Miliar dan juga batang hortikultura, ada 4.924.500 batang atau 47 Miliar Rupiah. Saya ingin bertanya Pak, kalau di Hortikultura ini ada pengembangan sistem pembenihan, terus juga pengembangan sistem perlindungan hortikultura. Benih batang hortikultura ini seperti apa, benih umbi rimpang hortikultura ini seperti apa? Karena ada lagi kita melihat banyak hal yang belum clear Pak karena memang penyebaran kegiatan ini juga saya pikir ada tumpang tindih, terus kenapa kita tidak mendorong hal-hal yang sudah eksisting. Karena kita lihat disini ada kawasan florikultura, anggek, krisan, mawar, melati, sedap malam, tanaman pot dan. Ini kan peningkatan produksi kan. Iya kan Pak? Kenapa kita tidak mendorong yang sudah eksisting dulu Pak. Saya sudah tidak bisa ngomong. Ya sudah.

Begitu saja Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya selanjutnya Pak Ichsan Firdaus.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Baik Pak Ketua.

Saya sebenarnya ingin memberikan masukan saja dalam mekanisme rapat ini. Menurut saya ini kan agak simpang siur datanya. Bu Kiki sama Bu Alien, tadi beberapa teman-teman juga. Saya usul saja Ketua, berikan kesempatan kepada Eselon I untuk memperbaiki ini semua walaupun waktu kita terbatas karena kemungkinan kan minggu depan kan kemungkinan kita ada kemungkinan lockdown karena ada himbauan dari Gubernur. Kalau saya

boleh usulkan begitu saja. Teman-teman yang belum bertanya, kasih kesempatan bertanya setelah itu kita skors untuk memberikan kesempatan kepada Eselon I semua untuk bisa memperbaiki ini semua. Kalau saya usul begitu saja Ketua. Dan menurut saya ini sebuah peringatan bagi Pak Sekjen sebenarnya untuk bisa mensikronisasi semua data yang simpang siur ini. Ini jelas tidak ada koordinasi ini sebenarnya. Mestinya kan seluruh data dikumpulkan oleh Pak Sekjen lalu kemudian baru disampaikan ke Komisi. Tapi kayaknya kok masing-masing Eselon I sendiri-sendiri nih masukinnya, perkiraan saya. Jadi saya usul Ketua, kasih teman-teman untuk bertanya, lalu kemudian setelah itu kita skors. Saya hanya mau ngomong itu saja Ketua.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Nanti saya minta persetujuan sidang, bukan anda yang menentukan bukan saya.

Selanjutnya Pak Andi Akmal.

#### **F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Pak Sekjen beserta dengan Dirjen di Eselon I Kementerian Pertanian.

Yang pertama Pak Ketua, saya kira mengenai *Food Estate* ini ya kita lihat dari sisi politis dan secara teknis. Secara politis ini kan sudah menjadi keputusan Pemerintah. PKS ini Partai Oposisi tapi kalau itu untuk menjadi bagus ya tentu kita dukung, tapi kalau tidak bagus tentu tidak kita dukung. Jadi secara politis harusnya Menteri nanti akan menjelaskan ke kita disini bagaimana kelayakan atau pun konsep *Food Estate* ini bersama dengan Kementerian lain karena yang saya dengar *leading sector*-nya ini kan Kementerian Pertahanan. Saya sudah bicara dimana-mana bahwa kita tidak setuju sebenarnya, Cuma ini kan sudah menjadi keputusan. Kita berbicara ke belakang ini saya kira kurang produktif.

Oleh karena itu secara politisnya mungkin nanti kita menitipkan nanti ke Pak Menteri Pertanian, sebenarnya seperti apa food estate itu. Nah secara teknisnya kita melihat Pak Dirjen Prasarana Pertanian ya, kita melihat bahwa Pak Menteri kemarin mengatakan ada beberapa calon ya daerah menjadi *Food Estate*. Kalimantan Tengah, kemudian Humbas. Tapi setelah saya lihat anggarannya disini Pak Dirjen, saya lihat dari tadi anggaran ini, saya baca juga Bu Kiki anggarannya ternyata hanya untuk Kalteng Pak ya kalau saya lihat disini. Hanya untuk Kalteng. 128.000 hektar. Nah pertanyaan besarnya sebenarnya berapa sebenarnya disana cocok untuk lahan pertanian

Pak, dari kaca mata teknis pertanian ya Pak ya, bukan politis. Kalau politis kan Presiden bisa mengatakan disana ada 1 juta. Ya tapi kan secara teknisnya yang menentukan adalah teman-teman dari Kementerian Pertanian. Apakah memang 128 hektar ini layak Pak untuk menjadi lahan pertanian. Baru kita bicara angka-angka Pak. Kan itu cara berpikirnya ya. Itu yang pertama.

Saya melihat juga kalau mengenai masalah Menteri PU, Menteri LHK, bahkan di Kementerian Pertahanan ya mungkin dengan mitra lain ya tapi kita mungkin secara teknisnya disini. Yang kedua, saya melihat dari sisi penganggaran Pak Dirjen. Kita melihat disini Pak banyak tumpang tindih, saya sudah catat semua tadi. Disini dikatakan bahwa untuk *Food Estate* itu anggarannya 3,3 Triliun sebenarnya, tapi untuk PSP hanya 2,2 Triliun Pak ya? Ini saya sudah catat semuanya. Dan disini Pak Dirjen, ada beberapa hal yang perlu kita informasi yang dalam terutama kami di Komisi IV ini sebelum nanti mengambil keputusan ya.

Nah misalnya saya melihat bahwa di anggaran regulernya Bapak. Reguler sebelum ada penambahan ini, Bapak sendiri sudah ada anggaran 2 Triliun untuk *Food Estate* ini Pak. Nah biar Bapak bisa dilihat disini ya, saya bacakan disini Pak Ketua. Disini ada di anggaran untuk perluasan dan perlindungan lahan pertanian. Disini saja sudah ada angka ekstensifikasi lahan 1,2 Triliun, intensifikasi 49 Miliar Pak ya. Terus ada lagi di Direktur Pupuk dan Pestisida, saprodi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung *Food Estate* Provinsi Kalteng 785 Miliar. Penyediaan saprodi mendukung peningkatan indeks pertanaman 200 Miliar. Ini anggarannya regulernya saja Bapak sudah 2 Triliun.

Nah ini kan tentu tidak mencerminkan keadilan anggaran Pak. Artinya hanya untuk Kalteng saja 2 Triliun. Sementara Provinsi lain yang berapa puluh, 34 Provinsi sekarang ya. Kita punya Provinsi ya kita berapa anggarannya yang didapat dari PSP ini Pak. Bahkan saya bandingkan dengan anggaran yang langsung ke petani. Yang langsung ke petani itu kan sebenarnya bantuan, misalnya pengelolaan air irigasi pertanian. Itu hanya 600 Miliar, bantuan Alsintan hanya 500 Miliar Pak. Ini kan untuk petani, untuk masyarakat. Kalau saya Anggota DPR, tentu saya lebih setuju kalau diperbesar anggaran untuk masyarakat petani kita. Jadi nanti dijelaskan. Ini 2 Triliun Bapak regulernya, ditambah lagi tambahan ABT-nya 2 Triliun Pak. Nah ini perlu penjelasan kepada kita semua sehingga nanti kita bisa melihat secara teknis anggaran secara teknis pertaniannya. Kalau politisnya Pak kita bisa berbeda pendapat, ada yang setuju, tidak setuju itu politisnya.

Kemudian yang lainnya saya tidak komentari Pak. Ini hanya dari PSP saja.

Kemudian untuk Dirjen PKH. PKH ini saya hanya, nanti bisa dijelaskan kepada saya pribadi nantinya tentang masalah 2 program yang agak sama namanya ini. Mungkin saya yang tak punya ilmu memahaminya, nanti bisa saya diberi pemahaman. Ada anggaran yang cukup besar tadi, nanti bisa dijelaskan kepada saya. Pada halaman 6 Pak Dirjen, dijelaskan saja kepada saya disini optimalisasi pre produksi ya. Ini 490 Miliar ya, kemudian targetnya

4 juta 100, ini sapi atau kambing ini targetnya ini Pak? Ini kan ekor doang disini, kita tidak tahu apa.

**KETUA RAPAT:**

Buntutnya saja, buntutnya saja.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):**

Kemudian yang kedua, dibawahnya lagi Ketua ada pengembangan ternak. Ini anggarannya tersebar ya. Jadi mungkin dijelaskan apa bedanya Pak dan optimalisasi reproduksi. Bedanya apa nih? Negara kita tidak paham tentang masalah ini.

Kemudian yang terakhir Pak Ketua, dari rencana lokasi kegiatan utama Dirjen Peternakan. Saya lihat ini programnya Bapak kecil-kecil semua Pak ya di Provinsi, apakah tambahan, apa ada program lainnya Pak Dirjen? Kalau domba hanya 25 per Provinsi ini kecil sekali sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah yang ada disini ya.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'allaikumsalam.*

Terima kasih.

Yang terakhir Pak Pimpinan, Pak Hasan Aminuddin.

Silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Ketua, dan segenap Anggota Komisi IV baik fisik maupun virtual, Sekjen, dan segenap Pejabat Eselon I Kementan.

Yang pertama, Horti ya. Saya tertarik dengan perencanaan Dirjen Horti ini yang akan membangun pasar tani. Kenapa? Karena saya melihat ini sebuah kebutuhan agar supaya petani meminjam bahasanya Pak Mindo Sianipar bagaimana petani ini, wong cilik ini berdaya, dibuatlah pasar tani.

Nomenklatur diubah jalan tani pasar hasil bumi. Saya berkepentingan Pak manakala dari sekian ratus Miliar ini betul-betul penempatannya sesuai dengan hasil kajian yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan petani. Suatu misal contoh Jawa Timur, Gubernur salah menempatkan Puspo Argo itu sehingga hari ini ada pembangunan yang mubajir. Saya ingin Pak Dirjen Horti ini datang ke Jatim, memilih tempat dimana petani bersarang untuk memasarkan hasil buminya. Banyak pedagang dari Surabaya datang berbondong-bondong sehingga harganya tidak berdaya.

Saya ingin memberi solusi, bagaimana di Daerah Jawa Timur Tapal Kuda (bukan Maduranya Slamet). Tapal kuda ini Pasuruan sampai dengan Banyuwangi. Ditaruh ditempatkan di Probolinggo, ada asset Pemprov. Cukup minta kepada Gubernur bagaimana asset yang ditanam tanaman yang hanya meningkatkan PAD yang sedikit itu ditanam pasar hasil bumi. Sehingga hasil bumi dari Lumajang yang terkenal, Probolinggo yang banyak alpukat, dan manggisnya, serta hasil bumi dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi ditempatkan pasar hasil bumi itu di wilayah Kabupaten Probolinggo. Pemanfaatan keluar Jawa bisa melalui angkutan laut, ada pelabuhan nasional di wilayah Kota Probolinggo. Ini khusus Pak Hortikultura. Saya sangat mendukung asalkan menempatkan tidak salah sebagaimana Gubernur menempatkan Pasar Argo di Jawa Timur tapi mubajir.

Yang kedua bawang putih, komitmen kata Pak Ketua. Dimana ini komitmennya para importir ini, ditanam dimana? Saya berharap tidak ada sebaran. Tentukan melalui forum yang terhormat ini dimana konsentrasi fokus untuk 2021 ini penanaman bawang.

Saya mengusulkan melalui teman-teman Komisi IV yang Jawa Timur taruh di lereng gunung Bromo, sehingga menambah keindahan seluruh lereng gunung Bromo. Saya tidak berbicara Dapil, namun berbicara untuk Indonesia. Karena lereng Bromo itu wilayahnya milik TNBTS nasional. Sehingga penempatan ini sekali lagi, saya tidak ingin ditipu tersebar namun kita sulit dari sisi pengawasan, tempatkan pada beberapa titik sehingga kita mampu mengawasi yang sebenar-benarnya.

Yang ketiga, Alsintan, bukan Elsinta kata Pak Ketua. Saya akan sepakat penganggaran kembali Alsintan walaupun ada pro kontra. Namun saya berharap CSR dari perusahaan Alsintan ini melakukan pelatihan yang manfaatnya akan include ini sekaligus bagaimana melatih anak muda. Kata Slamet Madura ini, petani milenial bisa terangsang, akan terangsang untuk berpartisipasi merekrut anak muda tertarik kepada petani.

Yang keempat, bertambahnya anggaran di Kementan sekian Triliun sehingga menjadi 20 sekian Triliun. Saya belum dengar komitmennya kepada penambahan alokasi pupuk subsidi. Manakala kurang pasti akan terjadi persoalan. Mau dibuat mekanisme yang bagaimana pun termasuk kartu tani, sekali lagi termasuk dibuatkan kartu tani pasti akan ada kebutuhan tatkala kebutuhan rakyat yang memiliki 2 hektar itu tidak diakomodir oleh Pemerintah dengan membelanjakan pupuk subsidi. Saya berharap bertambahnya anggaran di Kementan yang sekian Triliun ada komitmen menambah untuk

rakyat miskin yang memiliki hanya 2 hektar tanah. Barangkali sedikit yang perlu saya sampaikan Pak Ketua.

Terima kasih atas waktunya.

Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik karena saya menangani rakyat yang sedang naik Corona di wilayah Dapil saya sehingga saya terjun langsung, menyadarkan khususnya Pondok Pesantren karena ada sedikit pengasuh ini tidak mau distressing sehingga saya ingin menyelamatkan bagaimana anak bangsa ini sehat sehingga perlu pemahaman dan saya turun langsung. Mohon maaf, tidak hadir secara fisik.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Saya paham Pimpinan karena sambil nemenin Ibu Bupati. Slamet, 1 menit cukup? berapa menit? Jangan bicara kartu tani lagi. Kartu tani sudah selesai.

Silakan.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

*Bismilahirrahmanirrahim.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan, Anggota yang saya hormati,  
Bapak Sekjen, Dirjen dan jajarannya yang kami hormati pula.

Yang pertama kami akan focus pada Dirjen PKH. Kita lihat optimalisasi reproduksi ini anggarannya, kami anggap ini merupakan suatu produk lanjutan dari jadi kami inginkan dari anggaran 493M ini dikurangi 50%. Jadi 50 persennya ini 200 M. Jadi sisa 293 M. Dan perlu dialihkan kepada hal yang lebih menyentuh kepada masyarakat. Jadi tolong dikaji bagaimana untuk pengalihannya.

Yang kedua terkait masalah sapi potong. Kami perlu mempertimbangkan secara matang urgensinya dan sustainabilitynya. Sapi ini sifatnya hanya penggemukan. Tentunya kita lebih menginginkan bagaimana ada tindak lanjut. Kami minta untuk dikaji ulang, dan kami minta untuk dikurangi 50% dari 145M menjadi 72M. Dan dari 50 persennya ini kami minta ditambahkan keindukan ataupun bakalan impor yang semula 4.560 ekor, ini perlu *upgrading* 10 kali lipat dengan asumsi anggaran dari 130M.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Datanya benar enggak itu. Tanya dulu PKH benar tidak datanya?

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Betul tidak Pak Dirjen?

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:**

Ya ijin Pak Ketua.

Kalau angka iya, dan yang dimaksud dengan sapi disini adalah indukan Pak, bukan untuk penggemukan.

Terima kasih.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Artinya pada prinsipnya Pak kami menginginkan bagaimana anggaran ini dipotong dan dialihkan kepada hal yang lebih produktif.

Yang ketiga, saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Kang Haerudin tadi terkait masalah domba. Anggaran domba ternak ini dari 2000 ekor kami minta juga di upgrade sampai 20 kali lipat kalau perlu. Karena apa? Ini lebih massif kepada masyarakat. Karena kita lihat disini dari 7M kami minta tambahan 139M, dari mana? Dari reproduksi. Dari optimalisasi reproduksi tadi kita kurangi 200M. Jadi kita minta bagaimana optimalisasi reproduksi ini untuk dialihkan kepada anggaran domba.

Yang keempat, terkait masalah pengembangan UPT pembibitan Daerah dan ... center ini ada 11 unit. Kami menilai bahwa yang terjadi dilapangan ini kadang menjadi masalah dan unitnya mangkrak Pak. Ini berdasarkan fakta dan realita di lapangan. Jadi saya minta dari 11 unit dengan anggaran 34M ini kami minta kurangi jadi 14M. Jadi ini perlu dipertimbangkan oleh Ketua dan juga oleh teman-teman Komisi IV.

Yang kelima terkait masalah panen pedet. Ini ada anggaran 5M. Apa bedanya antara optimalisasi reproduksi ataupun terkait adanya pengembangan ternak. Kami rasa panen pedet dari anggaran 5M ini untuk dihapus, dan kami lihat dari adanya pengembangan ternak kami belum melihat adanya pembibitan terkait bebek. Karena Abang Sudin selalu gencar bahwasannya Madura sebagai potensi bebek.

**KETUA RAPAT:**

Dia tidak ngerti antara bebek sama itik, tidak ngerti dia.

Cukup?

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Sebentar Ketua. Jadi dari anggaran 5M ini kami minta untuk dialihkan, meskipun apa pun itu tidak penting.

Yang keenam, terkait adanya tambahan anggaran sesuai SBTA. Ini apa Pak SBTA? Ini anggarannya lumayan. Ini agak tidak jelas, kami minta untuk penjelasan secara konkrit. Kalau memang tidak begitu urgent kami minta untuk dilakukan pengalihan anggaran.

Terkait masalah hortikultura. Kami inginkan bagaimana Dirjen Hortikultura ini untuk membangun inovasi teknologi. Apalagi hari ini terkait hortikultura khususnya di Madura ini di Pulau Kangean terkenal dengan namanya melon tempung madu. Bagaimana kiranya kita lihat disini ada program pengembangan sistem perbenihan hortikultura dengan anggaran 349M, kami minta bagaimana untuk disisihkan anggaran untuk pembangunan grand house.

**KETUA RAPAT:**

Grand house itu apa? Saya tidak ngerti apa itu grand house.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Grand house itu semacam inovasi teknologi sebagai alat bagaimana seperti rumah-rumahan itu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oh, bikin rumah untuk kamu maksudnya?

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Bukan, untuk para petani khususnya yang dibidang hortikultura. Ini lumayan per titik 40 Juta Ketua.

Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Cuma permintaan kami, terkait adanya permintaan dari teman-teman tidak adanya sinkronisasi dengan apa yang ditampilkan dengan media yang ada dikita ini, ini mungkin di skors dulu Ketua. Sehingga ada pertimbangan lebih lanjut dari Pimpinan dan teman-teman.

Sekian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Yang mimpin saya loh, bukan kamu.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Saran Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jadi ada saran Eselon I, Sekjen, apakah mau diperbaiki anggarannya, apa angka-angkanya? Kita break dulu atau dilanjut. Kalau dilanjut pasti tidak sinkron, dan waktunya Cuma hari ini. Besok itu seharusnya kami tidak ada sidang, tapi karena siklus anggaran harus selesai pada hari Selasa. Selasa pun harusnya kami Paripurna pukul 14.00. Berhubung belum selesai pagi kita adakan Raker dulu.

Silakan dijawab.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Mohon ijin Pak Ketua.

Kami karena betul masalah waktu, kalau bisa dilanjut. Nanti Karantina bisa diperbaiki. Kalau memang harus ulang besok, besok. Kalau yang lain belum ada perubahan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Ichsan?

Anggota bagaimana?

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, saya ijin Ketua.

Menurut saya, ini kan semua sudah tuntas, dan sinkronisasi data ini menjadi persoalan walaupun itu Cuma Horti ya. Tetapi kemudian saya lihat juga lihat ada beberapa data yang. Eh sorry, mohon maaf, Karantina. Tapi ada beberapa data juga menurut saya perlu ada sinkronisasi. Saran saya Ketua, kita skors saja 1 jam. Ini kan mau Ashar juga sebenarnya. Kita skors dulu 1 jam. Kasih kesempatan semua para Eselon I untuk melakukan sinkronisasi, setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Karena kita punya waktu kan jam 16.00 Ketua. Ya bisa kita skors sampai jam 18.00-lah kira-kira begitu. Kita skors 1 jam, kemudian nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada waktulah.

**KETUA RAPAT:**

Saya ambil jalan tengahnya. Kita skors, nanti 15.30 kita masuk kembali setelah menyelesaikan data-data yang kurang jelas. Seharusnya gini loh, kemarin saya sudah komitmen dengan Kementerian LHK. Dari perencanaan pun kita dilibatkan. jadi tidak ada bertele-tele begini. Ini kan kalau terlihat bahwa sangat tidak professional. Ini semua masih *copy-paste*. Itu saja.

Skors 30 menit. Jam 15.30 kita masuk kembali.

**(RAPAT DISKORS SELAMA 30 MENIT)**

Kita mulai ya.

Skors saya cabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT)**

Tolong calo jangan berdiri di depan.

Bapak/Ibu semua,

Setelah tadi ada yang tumpang tindih anggaran, ada yang tidak sinkron, tadi Eselon I sudah rembukan, maka dengan ini saya bacakan kesimpulan rapat.

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian atas rancangan Pagu anggaran dalam RKA K/L Tahun 2021 dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp1.810.397.449.000,00.
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp124.581.831.000,00.
  - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp4.829.936.274.000,00.
  - d. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.082.206.411.000,00.
  - e. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.082.854.524.000,00.
  - f. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp5.262.615.749.000,00.
  - g. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp1.016.290.837.000,00.

Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi terhadap rancangan Pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai arahan dan masukan Komisi IV dalam Rapat Dengar Pendapat ini. Sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian.

Anggota?

Pemerintah?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Prinsipnya setuju hanya tadi diskusi kami dengan Kapoksi, seperti Sekjen ada, apakah nanti direvisi untuk bahan Raker menjadi 1,7 dikurangi, ditambahkan ke Irjen dan karantina. Nanti saja setelah untuk bahan Raker dengan.

**KETUA RAPAT:**

Nanti, ini kan kita menerima penjelasan dulu.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Oh menerima penjelasan.

Terima kasih.

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

Nanti baru kita revisi.

Karena yang membutuhkan dikasih tambah yang berlebihan kita potong.

Setuju ya?

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Cek dulu Ketua angkanya sama atau tidak yang usulan awal? Mohon ijin Ketua.

Mohon ijin.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Untuk Sekjen tolong dicek 1807091, yang bahan terakhir 2 September Bapak. Oh ya betul 1810397449. Mohon maaf.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Setuju?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mengenai pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp1.604.000.000.000,00. dengan rincian:
  - a. DAK fisik ketahanan pangan Tahun Anggaran 2021 sebesar 1,4 Triliun.

- b. DAK non fisik dana pelayanan pangan Tahun 2021 sebesar Rp204.000.000.000,00.

Selanjutnya Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk secara periodic melaporkan pelaksanaan penggunaan DAK tersebut di tiap Provinsi.

Anggota?

Pemerintah?

### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Setuju.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi begini Pak Sekjen. Kenapa kami minta? Selama ini kami tidak tahu dana DAK itu untuk apa, dimana? Paling tidak kalau kami punya bahan, kami bisa memeriksa. Mohon maaf, biasanya di Dinas atau di Daerah masih ada oknum yang sedikit-dikit nyimpanglah. Aturannya untuk ini, jadi untuk ini.

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun refocusing terhadap rancangan pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV dalam Rapat Dengar Pendapat, antara lain sebagai berikut:
- a. Realokasi anggaran di Kesekjenan.
  - b. Menambahkan alokasi anggaran Inspektorat Jenderal.  
(Supaya Pak Gatot jangan nanti kalau ke Lampung atau ke Daerah dibayarin makan).
  - c. Kegiatan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan dan pengembangan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
  - d. Kegiatan pengembangan padi, pengembangan jagung, pengembangan kedelai dan pengembangan pangan lokal di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
  - e. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura, peningkatan produksi buah dan hortikultura, pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah pada Direktorat Jenderal Hortikultura.
  - f. Kegiatan optimalisasi reproduksi sapi potong, domba, indukan impor, pengembangan UPT, pembibitan daerah dan *bull center* dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil ternak di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - g. Realokasi anggaran, kegiatan pengembangan manajemen diseluruh Eselon I.

Anggota?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali kegiatan *Food Estate* yang terdapat diseluruh Eselon I Kementerian Pertanian.

Anggota?

Pemerintah?

Ini bukan membatalkan. Meninjau kembali karena tadi yang gambar saya tayangkan itu dananya di PUPR 5 Triliun. Itu RDP di Komisi V.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kalau bahasanya untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait terhadap kegiatan *Food Estate*.

**KETUA RAPAT:**

Anggota?

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, itu kan salah satu bagian dari koordinasi. Itu adalah salah satu bagian upaya untuk meninjau kembali kalau kita terjemahkan. Jadi koordinasi, kemudian melakukan evaluasi penganggaran dan sebagainya itu bagian dari untuk meninjau kembali. Tadi Bahasa Pak Ketua tadi kan bukan membatalkan, tapi.

**KETUA RAPAT:**

Bukan membatalkan.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Tapi meninjau kembali.

**KETUA RAPAT:**

Karena yang saya khawatirkan adalah di Komisi V ada 5 Triliun, di Bapak juga ada lagi 2 Triliun untuk infrastruktur.

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

Saja Pak Ketua meninjau kembali anggaran.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Pak Dirjen bisa dijelaskan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya jelaskan yang pertama sudah diputuskan oleh Menteri Perekonomian bahwa penanggungjawab *Food Estate* padi itu Kementerian Pertanian, kemudian penanggung jawab *Food Estate* ubi kayu itu Menhan.

Kemudian kaitan dengan anggaran yang 5 Triliun itu di fokuskan untuk normalisasi saluran primer dan sekunder Pak. Sedangkan untuk pertanian yang 2,2 Triliun untuk pengolahan lahan dan saprodi.

Mungkin itu Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Masih ingat tidak, waktu itu Menteri Pertanian Raker disini mengatakan apa? Masih ingat tidak? Kami hanya menyiapkan bibit dan benih saprodi. Yang lain diurus oleh Menteri PUPR, masih ingat gak? Masih ada kata-kata. Saya masih selalu ingat apa yang dikatakan, bahkan pada waktu itu Menteri Pertanian tidak dapat porsi awalnya. Setelah menghadap Presiden baru ngomong bahwa untuk Saprodi dan lain-lain disiapkan oleh Kementerian Pertanian. Bagaimana dengan SDM? SDM-nya sebagian besar dibantukan dari Kementerian Pertahanan. Jelas tidak?

Coba kamu tayangin lagi tadi Teguh.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Ketua bisa tambahkan lagi Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Terima kasih.

Jadi penjelasan Pak Dirjen bisa kita pahami dari konteks food estatenya Pak ya dengan ABT-nya tadi itu. Tadi itu kan program bersama Kementerian yang lain ya. Saya pribadi Pak Dirjen butuh penjelasan juga sebenarnya yang dianggarnya regulernya Bapak itu. Yang saya tadi lihat disitu jumlahnya cukup besar, itu apakah satu keterkaitan atau lain penggunaannya. Itu mohon dijelaskan Pak Dirjen supaya kita tidak salah menduga gitu ya.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Baik Pak.

Jadi itu sekaitan Pak. Jadi kalau kita jumlahkan jumlahnya 2,2. Rinciannya ada di yang sudah disampaikan ke Bapak di belakang.

**KETUA RAPAT:**

Coba kamu tampilkan lagi deh supaya jelas.

**PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Jadi kalau sampaikan disini yang dimaksud Bapak ini pengembangan *Food Estate*, ekstensifikasi lahan dan itu di halaman 5. Jadi kalau kita lihat ini, itu memang lahan yang dari PUPR sama datanya itu ada 160.000 hektar, kemudian 85.000 hektar itu intensifikasi. Kita hanya membantu saprodi dan membantu pengolahan lahan Rp900.000 per hektar. Kemudian disana untuk 2021 ada program ekstensifikasi 79.500 hektar. Ini per hektarnya kita samakan dengan cetak sawah di wilayah barat 16 Juta walaupun standar di PUPR itu 24 Juta.

**KETUA RAPAT:**

Disini kita lihat coba. Dilihat, apa yang dikerjakan? Antara lain peningkatan irigasi.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Ini primer dan sekunder.

**KETUA RAPAT:**

Tahun 2021 itu Cuma 47.500. Tadi anda katakan 72.000. Dan saya tidak yakin 47.500 ini bisa berjalan. Yang namanya *land clearing* paling top dengan alat yang full mekanis. 1 tahun tidak lebih dari 5000 hektar. Okelah karena ini tidak ada bongkar akar, tidak apa, hanya pembuatan galengan lagi dan irigasi.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Masuk Pak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Nah itulah kenapa saya minta tadi Pak Ketua kita itu, ke siapa kita minta penjelasan agar kita mendapatkan gambaran utuh dari *Food Estate* ini. Kan ini lumbung pangan Pak Ketua. Ke siapa kita minta ini, berapa luas keseluruhannya, mau diapakan dia segala macam. Karena itu saya bilang tadi, saya keberatan karena Komisi kita adalah Komisi Ketahanan Pangan tetapi semua mitra kita itu nomenklaturnya adalah mendukung. Terus kita mendukung siapa? Apa bentuk dukungan kita? Karena dia bentuk aslinya bentuk utuhnya kita tidak tahu saya khawatir kita Cuma tutup kiri, tutup kanan setiap tahun itu saja kerjaan kita. mungkin dalam kesimpulan rapat itu kita minta dia mengkoordinasi mungkin kalau tidak menggunakan kata meninjau ulang itu. Kita berikan tugas dia untuk melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan kembali kepada Komisi IV.

Itu Pak Ketua.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya sebentar.

Nah ini kita lihat, setelah rehabilitasi irigasi, kondisi irigasi yang sudah baik. 2020 Cuma 1.200. 2021=33.300. 2022=22.655. Jumlah semuanya 57.200. Tadi 72.000 darimana? 2021 dengan 33.335 pun saya tidak yakin bisa. Kita lihat coba untuk saprodi pupuk dan lain-lain khusus untuk *Food Estate*. Hampir 1 Triliun loh.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

328 Miliar ditambah 435 Miliar untuk saprodinya. Sekitar 750 jutaan. Untuk intennya itu 55.456 hektar.

**KETUA RAPAT:**

Ini contohnya yang bisa diperbaiki Cuma 33.355. Berarti kan datanya antara PU sama pertanian kan tidak nyambung. Saya takut nantinya Kementerian Pertahanan bilang beda lagi. Sudah saya gusur pakai alat berat saya, jadinya sekian.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Ijin Pak Ketua.

Ini data ini dari PU sebetulnya. Jadi sudah kesepakatan dengan PU dari 79.000 ini setelah divalidasi oleh PU, hanya yang bisa digarap adalah 73.500.

**KETUA RAPAT:**

Saudara Dirjen, lihat tidak tayangan tadi? Ini tayangan ini bahan RDP beberapa hari lalu di Komisi V. Ini dananya 5 Triliun untuk perbaikan irigasi semuanya. Nah disitu ada ekstensifikasi 73.500 hektar. Ini apa lagi 1,176. Kan PU sudah mengerjakan secara semuanya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Saran saya terkait kesimpulan rapat yang tadi, merealokasi kembali anggaran serta berkoordinasi dengan. Karena begini, Bapak datanya ini kan data hari ini ya, jangan sampai ada over budget dan juga tumpang tindih juga. Kok bisa bahan rapatnya PU dengan yang dikasih Kementerian Pertanian kan berbeda. Itu mungkin. Jadi perlu untuk dikoordinasikan Pak. Jadi tidak apa-apa dimasukin. Ini supaya clear juga gitu loh. Begitu Pak Sarwo.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Sedikit. Sebetulnya sebelum kami menayangkan ini sudah koordinasi dengan Dirjen SDA. Jadi kalau PU itu membangun jaringan irigasi primer, sekunder 20.000 itu bisa mengairi mungkin 40.000 hektar, begitu komentarnya Beliau itu. Jadi tidak berarti bikin sungai 20.000 hektar hanya 20.000 hektar yang diairi, tidak Pak. Jadi membuat jaringan tertier sama sekunder 20.000 itu bisa mengairi 40.000 hektar. Kira-kira begitu bahasanya.

**KETUA RAPAT:**

Tadi kan sudah dilihat 2000 itu 1350 hektar. 2021=33.355. Saya tuh paham Pak, bukan tidak paham Pak. Cuma salahnya itu kenapa dulu SDA itu pindah ke PU. 2009-2014, SDA itu adanya di Kementerian Pertanian. Bukannya begitu Pak Gatot? 2009 itu saya masih ketemu namanya Hilman. Masih disini Pak. Itulah penggagas *Merauke Integrated Food Estate and Energy*. Masih disini. Kenapa proyek itu ada? Karena pesanan. Itu saja. 2009, saya masih ketemu dia disini. Coba dulu SDA itu di pertanian kan lebih gampang. Tinggal koordinasi. Bukan tersier tapi sekecil sekunder, tersier, semua jadi satu. Gitu loh.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ketua, saya tadi yang usulan Bu Kiki saya setuju. Jadi mengkoordinasikan dengan ini dan evaluasi kegiatan tambah dan anggaran.

**KETUA RAPAT:**

Coba dibikin redaksinya.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Usulan Pak Johan dengan Bu Kiki saya setuju.

**KETUA RAPAT:**

Balik lagi ke kesimpulan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Untuk berkoordinasi dengan K/L terkait dan meninjau kembali kegiatan/anggaran. Jadi lebih smooth.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sekjen, kami bukan mau menghambat. Kami juga di Komisi IV punya jiwa nasionalis. Kami mendukung iya agar jangan sampai ada krisis pangan. Cuma kami juga tidak mau dibilang, bego amat sudah di PU dianggarkan, disini dianggarkan. Saya juga tidak mau dibilang begitu.

Saya bacakan Nomor 4.

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan meninjau kembali kegiatan/anggaran *Food Estate* yang terdapat diseluruh Eselon I Kementerian Pertanian.

Anggota?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini paling lambat hari Sabtu, 12 September 2020. (berarti sebelum Rapat Kerja hari Senin).

Anggota?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan, (bukan pembatalan) pelaksanaan kartu tani dan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh sistem pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Kepada Anggota dan mungkin TA juga, seingat saya waktu itu kita menyimpulkan ada laporan.

**KETUA RAPAT:**

Ada, kesimpulannya rapatnya pada waktu Rapat Kerja.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Iya, bahwa waktu itu *pilot project*-nya untuk difokuskan dulu masalah kartu tani ini di satu wilayah dulu. Itu juga supaya Pak Dirjen dan Pak Sekjen serta Pak Menteri memahami bahwa kami menunda itu karena alasannya cukup clear, bukan menghambat.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Karena kalau kami pulang ke Daerah pasti Anggota Dewannya tidak benar, masa urus pupuk saja tidak bisa. Kalau saya menjawab, saya tidak punya pabrik pupuk makanya tidak bisa urus.

Anggota?

Pemerintah?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Mohon ijin Pak Ketua.

Ini ada redunden, ada kata penundaan, ada kata secara bertahap. Kami usul karena memang dilakukan secara bertahap kata-kata penundaan dihapus, tapi dilaksanakan secara bertahap.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Ijinkan saya berbicara karena kemarin saya yang menekankan soal kartu tani ini. Seingat saya, RDP atau Raker waktu itu kita meminta untuk wilayah tertentu. Tapi kartu tani ini ternyata setelah hasil Raker kemarin bersama Menteri sudah tersebar di beberapa Provinsi. Maka dari itu. Pak Sekjen, ini bukan lagi. Harusnya kalau bisa diberhentikan karena memang tidak berjalan dengan baik. Tapi karena ini baiknya penundaan ini masih ada kata "toleransi" dari Komisi IV, maka dari itu Bapak tolong ini dipertimbangkan sebaik mungkin. Ini "penundaan" adalah Bahasa yang paling tepat. Karena kalau kita balik lagi soal kartu tani ini, ini masalahnya paling besar.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sekjen, santai saja belum maghrib. Sebentar lagi maghrib. Selesai kita sebentar lagi.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Ijin Pak Ketua, kalau boleh bahasanya agar tidak bertentangan dengan surat edaran Dirjen KPK dan LHP BPK, mungkin bahasanya meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan secara bertahap pelaksanaan kartu tani hingga seluruh sistem pendukungnya berjalan dengan baik. Melaksanakan secara bertahap pelaksanaan kartu tani hingga seluruh system pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar. Jadi artinya disini, petani yang sudah punya kartu tani dan sudah melaksanakan di sejumlah Kabupaten tetap dilanjut, yang belum ya secara manual. Nanti secara bertahap kita sempurnakan, tentunya dengan koordinasi dengan Himbara dan Pupuk Indonesia.

Mungkin itu Pak Ketua, ijin.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pak Hasan.

**KETUA RAPAT:**

Oh Pak Hasan. Kalau Pimpinan boleh ngomong, Anggota jangan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Saya minta penjelasan yang rill, yang jujur. Kabupaten dan Kota mana yang sudah siap? Sepanjang perbankan yang melakukan pembuatan kartu tani, tangannya itu tidak sampai dengan Rt/Rw Pak. Jawa Timur tidak ada yang butuh dilakukan. Sehingga saya berharap ini betul-betul. Jangan dihantui oleh surat edaran KPK-lah. KPK itu akan menindak tatkala ada pelanggaran. Saya berharap Pak Dirjen, mari bagaimana kinerja Kementan itu betul-betul tidak ada persoalan. Sekali lagi jangan dihantui oleh surat edaran KPK, sehingga kita dibuat sibuk dengan urusan kartu tani yang tidak beres hanya targetnya membangun opini. Opini seakan-akan jujur. Kan itu Pak Ketua. Mohon maaf saya sepakat dengan yang lain Pak Ketua, ini ditunda. Bahasanya ditunda, menunggu kesiapan yang betul-betul. Manakala Perbankan yang melaksanakan saya tidak yakin dan hakul yakin ini tidak akan berhasil. Kecuali diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang tangannya sampai dengan Rt/Rw.

Sekian, terima kasih Pak Ketua.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Pimpinan, ijinkan saya masuk.

**KETUA RAPAT:**

Masuk kemana?

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Masuk menambahkan apa Kyai Hasan.

Pimpinan, saya berharap coba Direktur Pupuk tolong menyampaikan karena mungkin yang paling paham juga ini, bukan Cuma PSP saja ini. Karena ini dilapangannya berhubungan langsung sama Direktur nih. Saya minta penjelasan dari Beliau Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA (MUHAMMAD HATTA S, STP., M.M.):**

Terima kasih.

Mohon ijin Bapak Ketua.

Bapak/Ibu sekalian, Pak Dirjen, Pak Sekjen.

Sebelum saya menjelaskan, mungkin sedikit mengingatkan kembali bahwa dasar kita untuk menerapkan implementasi kartu tani itu dari kesimpulan Raker DPR tanggal, 27 Januari yang menetapkan wilayah Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat sebagai pilot project. Dalam perjalanan turun surat KPK per tanggal 19 Agustus yang merekomendasi terkait perbaikan tata kelola subsidi pupuk yang mewajibkan kartu tani sebagai satu-satunya alat tebus pupuk subsidi. Setelah ini kita tindaklanjuti dengan menyurat ke Kadis Pertanian dan PIHC. Setelah Rapat Kerja tanggal 27 Agustus, penerapan kartu tani akan dilakukan secara bertahap pada wilayah percontohan yang ditetapkan pada Raker DPR 27 Januari 2020. Kami menyurat lagi ke PIHC menyatakan bahwa bagi petani yang belum mendapatkan kartu tani boleh menebus pupuk subsidi dengan cara manual sepanjang data petani tersebut ada di e-RDKK yang telah ditetapkan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Pak Direktur tahan sampai disitu. Ada 3 daerah kan tadi, coba Bapak jelaskan.

**DIREKTUR PUPUK DAN PESTISIDA:**

Jawa, Madura, Sumbawa, Sumbawa Barat.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Terus, kartu tani yang tersebar sekarang yang jadi masalah itu salah satunya ada di Sulawesi Selatan Pak. Termasuk di Jawa Timur, di Jawa Tengah.

**KETUA RAPAT:**

Jadi begini Pak Direktur, anda kan baru. Uji coba di beberapa Provinsi. Coba anda punya no telepon Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah? Anda telepon, apa dia bilang. Pasti dia menolak. Karena dia telepon saya. Ketua, ini sangat berantakan. Cobalah diberi kelonggaran. Itu loh.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Interupsi Pak Ketua.

Ini perlu ditanyakan ini Direktur Pupuk ini. Tanyakan tupoksinya ini karena baru ini. Jangan-jangan dia jadi Direktur tidak ngerti Tupoksinya asal Jawa, Jawa mana, Kabupaten mana. Datanya tidak mungkin tahu. Tanya Tupoksinya dulu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya sabar Pak. Sholat maghrib dulu Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Belum maghrib.

**KETUA RAPAT:**

Disini ada surat dari Bupati Jombang, tertanggal 3 September. Kepada yang terhormat Menteri Pertanian di Jakarta. Memperhatikan surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 510.1SR.340/B5.2/08200, tanggal 26 Agustus tentang tata kelola subsidi pupuk dengan ini diberitahukan bahwa pemberlakuan penggunaan kartu tani per 1 September terdapat 54.000. 54.745, petani belum mendapatkan kartu tani dari BNI'46 sehingga tidak dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Keadaan tersebut mengakibatkan keresahan petani dan rendahnya produktivitas tanaman pangan sehingga menurunnya kontribusi Kabupaten Jombang dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk kepentingan tersebut dengan ini mengajukan permohonan agar pelaksanaan implementasi kartu tani ditunda sampai dengan 31 Desember 2020.

Nanti kalau saya suruh buat Kabupaten semua bikin surat bagaimana? Tadi kan dikatakan tuh waktu Januari, uji coba. Ini Pak Sekjen suratnya dari Bupati Jombang. Nanti kasih dia.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Pak Ketua, kalau misalnya untuk mengizinkan petani melakukan transaksi manual, dan. Jadi tetap transaksi manual harus diinikan. Jadi untuk mengizinkan petani melakukan transaksi manual dalam pembiayaan pupuk.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

Maaf Pak Momon. Maaf dengan segala rasa hormat.

Pak Direktur,

Maaf ini menanyakan sedikit latar belakang Bapak dari ASN PAN yang sudah bergelut dibidang pupuk atau tidak Pak? Sedikit nanya saja. Karena begini, Bapak berbicara tadi surat edaran dari KPK. Coba Bapak baca ulang. Saya yakin di Kesekjenan di Kementan juga ada Biro Hukum ya.

**SEKJEN KEMENTAN:**

Ada.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Ya. Kenapa kami meminta menunda. Saya yakin surat KPK itu apabila ditafsirkan secara hukum itu kan harusnya yang ditindaklanjuti temuannya itu dulu Pak. Nah apabila itu mau berjalan, benahi dulu yang sudah ini baru itu berjalan makanya kita minta ditunda dulu. Kan kami merespon surat dari KPK itu Pak sebenarnya. Benahi dulu yang sudah berantakan ini maksudnya Pak Hasan dan Ibu Alien ini, tunda sementara baru jalan bertahap. Tapi ya silakan (suara tidak jelas).

Dan terakhir mungkin kita boleh minta sama senior juga kasih masukan. Pak Mindo nih paham betul juga. Pak Mindo minta pencerahan Pak Mindo.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Saya pikir yang pertama itu yang harus kita lihat bagaimana melayani petani. Iya toh. Yang kedua adalah niat kita untuk efisiensi. Jadi pertama pointnya harus sambil menunggu pembenahan ini bla-bla-bla maka petani dilayani dengan cara manual selama ini. Begitu saja.

**KETUA RAPAT:**

Coba dibantu redaksinya karena saya bukan ahli Bahasa.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan transaksi secara manual bagi petani yang belum memiliki kartu tani hingga seluruh system pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Interupsi Pak Ketua.

Coba Pak Momon, tunjukkanlah Kabupaten atau Kota mana yang sudah selesai kartu taninya. Ambil sampelnya katanya Jawa. Jawa yang mana ini?

**KETUA RAPAT:**

Ya sabar Kyai, sabar.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Karena menurut data ini untuk Jabar yang sudah melaksanakan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Banten itu Tangerang. Jateng, Batang, Banyumas, Temanggung, Semarang, Pati, Kabupaten Magelang, Brebes, Purworejo, Karanganyar

walaupun belum seluruhnya tapi mereka sudah melaksanakan. Jatim itu Sumenep dan Kota Batu. Jambi, Batanghari, Krinci, Kota Sungai Penuh, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kepahiyang, Kota Bengkulu. Sumut itu Kabupaten Dairi. NTB, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang yang saya tanyakan, itu sudah transaksi atau baru terima kartu?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Ada yang sudah transaksi. Datanya ada disini. Memang masih sebagian kecil tapi ada yang berjalan.

**KETUA RAPAT:**

Kalau tidak begitu tidak mungkin Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah protes ke saya.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Sehingga menurut kami yang sudah jalan biar jalan, yang belum biar manual itu sendiri. Sesuai dengan surat edaran yang kemarin kita ralat tanggal 7 September. Dan itu pun sudah dimengerti oleh distributor dan kios.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang suratnya ada tidak?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:**

Ada.

**KETUA RAPAT:**

Coba saya minta surat penundaannya.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.SI/PIMPINAN):**

Pak Ketua, kartu tani yang dibuat itu harus dilengkapi juga dengan alat gesek di pengecer. Kartunya selesai, alat geseknya tidak ada. Mau digesek dimana ini? Di poskamling?

**KETUA RAPAT:**

Ya digesek dimana saja bolehlah.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.SI/PIMPINAN):**

Coba ditanyakan ke Direktur Pupuk baru ini.

**F-PG (ALIEN MUS)**

Aku baru mau kenalan nih.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.SI/PIMPINAN):**

Lah iya kenalan coba. Tanyain.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Pak kalau misalnya untuk melakukan penundaan sampai akhir tahun ini untuk dilakukan perbaikan system. Jadi ada penundaan sampai akhir tahun ini untuk perbaiki system. Kalau sistemnya sudah baik baru kita jalan lagi. Jadi untuk melakukan penundaan sampai akhir Tahun 2020 hingga seluruh sistem pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Pak Ketua, mungkin kita minta mereka juga mencabut surat edaran itu.

**KETUA RAPAT:**

Sudah, saya lagi minta suratnya. Bapak sabar. Nanti saya kasih Bapak fotocopynya. Kalau Bapak mau aslinya bayar lagi sama saya.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Sebab begini Pak Ketua, kesimpulan rapat kita kan menunjuk beberapa Provinsi dan Kabupaten tetapi faktanya sudah banyak sekali Provinsi tadi itu. Jangan sampai nanti sudah kita sepakat disini, mereka kerjakan lain juga Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Mana suratnya Pak Direktur?

Atau yang ini kita tunda dulu sambil nunggu print, karena saya mau tahu surat ini apa?

7. Komisi IV Dewan Perwakilan Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan petani mengenai aspek *After Sales Service* dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik pra panen maupun pasca panen.

Anggota?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ke penyedia atau Kementerian Pertanian Pak?

**KETUA RAPAT:**

Oh, saya tidak ada urusan sama penyedia Pak. Itu urusan Bapak, penyedia. Kami pun kenal juga enggak.

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

Kalau bisa masih dalam kontraknya Kementan dengan penyedia gitu.

**KETUA RAPAT:**

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

8. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan yang dirancang berdasarkan Tupoksi dan skala prioritas serta memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi pangan nasional.

Anggota?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

Tadi suratnya mana pencabutan?

Lama amat ngeprintnya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Mungkin surat KPK-nya sama ya Pak Direktur, Pak Dirjen? Coba dibaca 3,4,5. Jadi sebenarnya Komisi IV juga menindaklanjuti surat edaran KPK. Itulah alasan kita menunda juga.

Point 3, atas akurasi data administrasi yang sudah baik. Kami mohon Menteri Pertanian mengambil tindakan untuk perbaikan tata kelola subsidi pupuk antara lain: 1. Betul, mewajibkan penggunaan kartu tani sebagai satu-satunya alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani termasuk didalamnya optimalisasi distribusi kartu tani dan penggunaan edisi diseluruh Indonesia, 2. Penggunaan dashboard bank penggunaan kartu tani sebagai pembayaran pupuk bersubsidi kepada PIHC, 3. Menghapuskan anomaly nama kosong dan data ganda di kedua basis data tersebut. Jadi ini layak untuk ditunda karena ada point 3 juga. Iya makanya, kan berproses Pak. Apa bisa langsung brek hilang kan tidak juga. 4. Menyesuaikan data petani pada 2 basis data tersebut sesuai dengan data kependudukan dan berhasil dipadamkan, 5. Melakukan verifikasi. Itu yang tadi Pak Johan bilang kalau sudah meninggal dan bagaimana, dan validasi untuk data petani yang belum selesai dengan data kependudukan. Jadi saran saya, menindaklanjuti juga apa yang sudah disampaikan oleh KPK. Kita mendukung Kementerian Pertanian, tetapi ini juga memang surat ini menunjukkan layak juga untuk ditunda untuk diverifikasi.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi suratnya Pak Johan sudah saya lihat, tanggal 7 September 2020 hal: penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.

Menyusul surat kami Nomor 510.1/SR.340/B5.1082020, tanggal 26 Agustus 2020, hal tata kelola subsidi pupuk. Bersama ini kami sampaikan bahwa kondisi ditingkat petani saat ini masih yang belum terdistribusi kartu tani. Untuk itu penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup melalui kartu tani dikecualikan bagi para petani yang terdaftar di RDKK namun belum mendapatkan kartu tani. Penebusannya dapat dilakukan secara manual apabila sudah memasuki musim tanam. (ya kalau tidak musim tanam, mana mungkin petani beli pupuk). Kami harapkan agar Saudara segera menyampaikan kepada para distributor, kios, pengecer pupuk bersubsidi agar dapat melayani penyaluran pupuk bersubsidi.

Jadi yang kesimpulan yang Nomor 6 bagaimana?

Ini surat sudah ada balasan belum dari Pupuk Persero, dari PI sudah ada balasannya?

Yang Nomor 6 dibaca dulu Anggota sebelum kita mengakhiri Rapat Dengar Pendapat hari ini.

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Sampai akhir Tahun 2020 dihapus saja hingga seluruh sistem pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar. Ini dihapus saja Pak Ketua, "sampai akhir tahunnya" dihapus. Kita memaksa bagaimana, sampai dengan system pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar.

**KETUA RAPAT:**

Tapi sebetulnya kalau Tahun 2020 itu dicantumin juga tidak masalah. Kalau memang belum bisa berjalan ya mundur lagi.

Ya Pak Kyai ya?

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Boleh, boleh.

**KETUA RAPAT:**

Setuju ya?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini, kami persilakan Saudara Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Kami mewakili teman-teman Eselon I dalam RDP hari ini mengucapkan terima kasih atas saran, masukan sehingga hasil dari pertemuan ini Inshaa Allah akan memperbaiki program dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2021.

Terima kasih.

*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'allaikumsalam.*

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)**

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy  
NIP. 196508171988031002